LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK
Jl. Supriyadi No. 5 Nganjuk Kode Pos 64412

kesbangpol.nganjukkab.go.id bakesbangpol@nganjukkab.go.id bakesbangpol_nganjuk Kesbangpol kab.nganjuk

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat disusun dan disajikan dengan baik.

LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk selama Tahun Anggaran 2025, yang disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kinerja berbasis hasil (result oriented) sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini juga menjadi instrumen penting dalam menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, baik RPD 2024–2026 maupun RPJMD 2025–2029.

Sepanjang tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada penguatan stabilitas sosial politik, pencegahan dan penanganan konflik sosial, peningkatan kesadaran politik dan pendidikan kewarganegaraan, penguatan demokrasi, serta pembinaan kerukunan umat beragama. Berbagai capaian kinerja yang diraih menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, demokratis, dan kondusif bagi pembangunan daerah.

Penyusunan LKjIP ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban formal, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk, baik unsur pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi

kemasyarakatan, maupun seluruh pemangku kepentingan lainnya. Sinergi dan kerja sama yang baik ini menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas sosial politik dan memperkuat persatuan serta kesatuan bangsa di daerah.

Akhir kata, semoga LKjIP Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, perencanaan, dan pengambilan kebijakan ke depan, serta menjadi referensi dalam upaya peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk secara berkelanjutan.

Nganjuk, 30 Januari 2026

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK

Drs. EKO SUTRISNO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680311 198903 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 2
1.3. Landasan Hukum 3
1.4. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi 4
1.5. Sumber Daya manusia 6
1.6. Isu-isu Strategis 9
1.7. Sistematika 10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 12
2.1. Rencana Strategis (Sumber dari Renstra SKPD) 12
2.2. Perjanjian Kinerja 2025 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 17
3.2. Realisasi Anggaran 64
BAB IV PENUTUP 69
A. Permasalahan 69
B. Strategi Pemecahan Masalah 70
C. Upaya-upaya organisasi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja 71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Administrasi Kepegawaian 7
Tabel 1.2 Data Pejabat berdasarkan Eselon 7
Tabel 1.3 Susunan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk berdasarkan Tingkat Pendidikan 7
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2024-2026 14
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2026 14
Tabel 3.1 Kriteria Nilai Capaian 17
Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2025 19
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa tahun Terakhir 32
Tabel 3.4 Target Kinerja Berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 36
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 37
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional (Berdasarkan Renstra 2024-2026) 40
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional (Berdasarkan Renstra 2025-2029) 43
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja 45
Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Dana 48
Tabel 3.10 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan, Kegagalan Pencapaian Kinerja 51
Tabel 3.11 Link Bukti Dukung 60
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Tahun 2025 64

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam iklim demokrasi dan semangat reformasi, tuntutan akan kepemerintahan yang baik semakin tinggi. Semangat reformasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara adalah berupa tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini memerlukan penerapan prinsip-prinsip good governance. Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu penerapan sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah adalah Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah.

Kewajiban instansi pemerintah dalam melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja instansi pemerintah tersebut selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Dimana penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dibangun dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan

program instansi pemerintah. Badan Kesatuan Bangsa dan politik dalam hal ini wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para pihak terkait yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
3. sebagai bahan acuan bagi pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dalam menyusun program di tahun berikutnya sehingga dapat dirancang dengan lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.3. LANDASAN HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

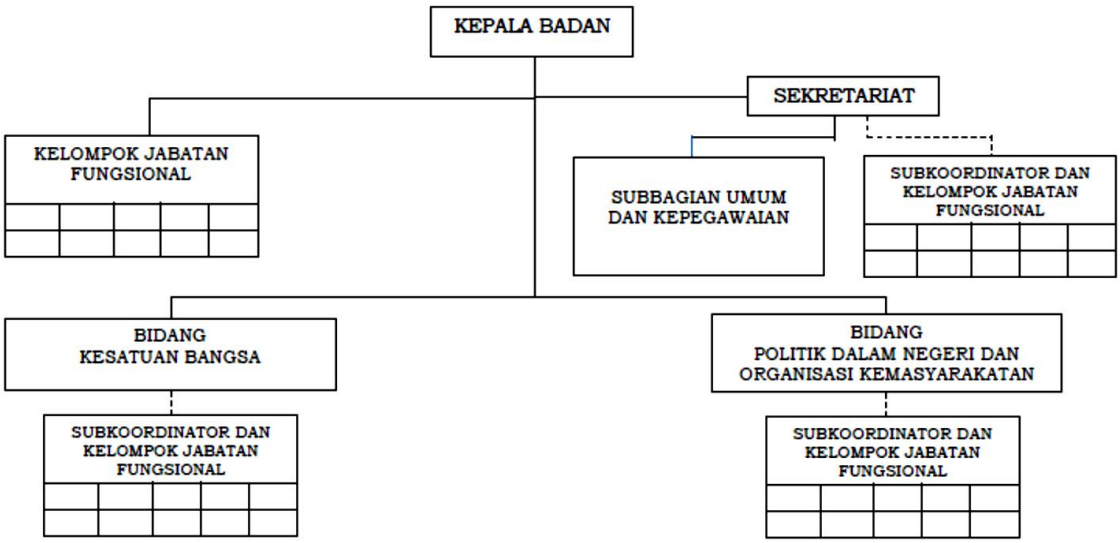
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024–2026.
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024–2026.
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan perubahannnya.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

1.4.1. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk mengacu pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK
(Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022)



1.4.2. TUGAS

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.4.3. FUNGSI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional

dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

1.5. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah merupakan aset organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Jumlah Pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk pada Desember Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Administrasi Kepegawaian

Jumlah pegawai / personil

No.	Uraian	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
1.	Pegawai Tetap (PNS)	9	4	13
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	6	2	8
	Total	15	6	21

Sumber : DUK Bakesbangpol 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik Kabupaten Nganjuk yang berstatus PNS sebanyak 13 orang, P3K sebanyak 8 orang.

Tabel 1.2

Data Pejabat berdasarkan Eselon

Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
Kepala Badan	II b	1
Sekretaris	III a	1
Kepala Bidang	III b	2
Kasubag	IV a	1
Fungsional	IV a	4

Sumber : DUK Bakesbangpol 2025

Tabel 1.3

Susunan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk berdasarkan Tingkat Pendidikan

a. PNS

Pangkat / Gol	S2	S1	SLTA	SLTP	SD
Pembina Utama Muda / IV/c	1	-	-	-	-

Pangkat / Gol	S2	S1	SLTA	SLTP	SD
Pembina Tk. I / IV/b	1	-	-	-	-
Pembina / IV a	1	1	-	-	-
Penata Tk I / III d	-	5	-	-	-
Penata / III c	-	-	-	-	-
Penata Muda Tk I / III b	-	1	-	-	-
Penata Muda / III a	-	-	2	-	-
Pengatur Tk. I / II d	-	-	-	-	-
Pengatur / II c	-	-	1	-	-
Pengatur Muda Tk I / II b	-	-	-	-	-
Pengatur Muda / II a	-	-	-	-	-
Juru Tk I / I d	-	-	-	-	-
Juru / I c	-	-	-	-	-
Juru Muda Tk. I / I b	-	-	-	-	-
JUMLAH	3	7	3	-	-

b. P3K

Pangkat / Gol	S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Golongan XVII	-	-	-	-	-	-
Golongan XVI	-	-	-	-	-	-
Golongan XV	-	-	-	-	-	-
Golongan XIV	-	-	-	-	-	-
Golongan XIII	-	-	-	-	-	-
Golongan XII	-	-	-	-	-	-
Golongan XI	-	-	-	-	-	-
Golongan X	-	-	-	-	-	-
Golongan IX	-	-	-	-	-	-
Golongan VIII	-	-	-	-	-	-
Golongan VII	-	-	1	-	-	-
Golongan VI	-	-	-	-	-	-
Golongan V	-	-	-	6	1	-

Pangkat / Gol	S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Golongan IV	-	-	-	-	-	-
Golongan III	-	-	-	-	-	-
Golongan II	-	-	-	-	-	-
Golongan I	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	1	6	1	-

Sumber : DUK Bakesbangpol 2025

1.6. ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana Strategis, maka yang menjadi isu utama dalam organisasi dalam pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah peningkatan kualitas perencanaan OPD dan kualitas pengelolaan keuangan. Selain itu dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas yaitu:

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
    - Kurangnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila terutama di kalangan generasi muda, sehingga rentan terhadap ideologi lain yang bertentangan.
    - Penyebaran berita bohong dan informasi yang menyesatkan yang dapat memecah belas persatuan dan merusak tatanan sosial.
    - Meningkatnya intoleransi antar kelompok masyarakat berdasarkan agama, etnis, suku atau pandangan politik yang dapat memicu polarisasi dan konflik sosial.
    - Penyebaran ideologi radikal dan ekstrem yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk melalui media sosial dan kelompok-kelompok tertentu.

2. Pemeliharaan stabilitas Politik dan Keamanan
    - Adanya potensi konflik yang dipicu oleh berbagai faktor seperti ketidakadilan ekonomi, isu SARA, atau perbedaan pandangan politik
    - Dinamika politik terutama menjelang dan pasca pemilu yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kondusifitas daerah
3. Peningkatan Demokrasi dan partisipasi politik
    - Tantangan dalam meningkatkan kualitas demokrasi termasuk partisipasi pemilih, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu
    - Kurangnya pendidikan politik yang memadai bagi masyarakat sehingga partisipasi politik kurang optimal dan rentan terhadap isu-isu primordial.
    - Optimalisasi peran organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat demokrasi dan partisipasi publik
4. Penguatan kelembagaan kesbangpol
    - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia(SDM) kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara selektif
    - Penguatan koordinasi dan sinergitas dengan instansi pemerintah lainnya, TNI/Polri, organisasi masyarakat, dan pihak terkait dalam penanganan isu-isu strategis

1.7. SISTEMATIKA

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk tahun ini menjelaskan pencapaian Tujuan maupun Sasaran yang diperjanjikan Tahun 2025. Pencapaian kinerja tersebut membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja serta kinerja tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik sebagai berikut :

- Bab I (*Pendahuluan*), menjelaskan secara ringkas kondisi umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II (*Perencanaan dan Perjanjian Kinerja*), menjelaskan tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025.
- Bab III (*Akuntabilitas Kinerja*), menjelaskan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- Bab IV (*Penutup*), berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Secara Umum Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan kebijakan strategis Kabupaten Nganjuk sebagaimana berikut :

2.1. Rencana Strategis (Sumber dari Renstra SKPD)

Renstra Tahun 2024–2026 diarahkan pada upaya penguatan stabilitas sosial dan peningkatan kualitas kehidupan demokrasi masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan pencegahan konflik sosial. Selain itu, dilakukan penguatan penanganan konflik sosial melalui peningkatan persentase konflik sosial yang tertangani.

Di sisi lain, peningkatan kesadaran politik dan pendidikan kewarganegaraan juga menjadi fokus utama, yang ditunjukkan melalui peningkatan persentase pengetahuan masyarakat mengenai struktur pemerintahan, proses politik, dan hak-hak politik. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, dan demokratis

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Renstra ini diselaraskan dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk difokuskan pada penguatan stabilitas politik dan keamanan daerah, peningkatan kerukunan umat beragama, penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat dan partai politik, serta penguatan demokrasi daerah. Sasaran strategis diarahkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun, demokratis, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan kebangsaan.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk menetapkan program dan kegiatan yang mencakup fasilitasi kerukunan umat beragama, pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, pendidikan politik bagi masyarakat dan kader partai politik, serta pemantauan dan evaluasi perkembangan demokrasi dan politik daerah. Pelaksanaan program didukung oleh penguatan kelembagaan, sinergi lintas sektor, serta partisipasi aktif pemangku kepentingan.

Renstra ini juga menekankan pentingnya inovasi dan pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja guna memastikan capaian indikator kinerja utama dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi landasan strategis dalam mendukung terciptanya kondisi daerah yang kondusif, demokratis, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila**.**

2.2. Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian kinerja adalah suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan/instasi yang lebih tinggi kepada pimpinan instasi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan Perjanjian Kinerja terwujudlah suatu komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta Sumber Daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah suatu Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Renstra 2024-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya pencegahan konflik sosial	Persentase potensi gangguan/konflik yang teratasi	%	94
	Meningkatnya penanganan konflik sosial	Persentase konflik sosial yang tertangani	%	82
	Meningkatnya kesadaran politik dan pendidikan kewarganegaraan	Persentase pengetahuan masyarakat tentang struktur pemeintahan, proes dan hak politik	%	82

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Renstra 2025-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya tatanan sosial politik yang demokratis dalam kehidupan berbangsa yag harmonis	Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	79,29
2.	Meningkatnya nilai toleransi keagamaam	Nilai Indeks toleransi Kabupaten Nganjuk	Nilai	79,13
3.	Meningkatnya nilai kesetaraan antar umat beragama	Nilai Indeks kesetaraan umat beragama	Nilai	79,42
4.	Meningkatnya Nilai Kerjasama antar umat beragama	Nilai Indeks kerjasama umat beragama Kabupaten Nganjuk	Nilai	79,28
5.	Meningkatnya kapasitas Lembaga Demokrasi	Skor Capaian kinerja kapasitas lembaga demokrasi Kabupaten Nganjuk	Skor	79,93

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.253.635.113	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.959.940.840	APBD
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	5.358.948.000	APBD
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	927.182.100	APBD
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	502.393.350	APBD
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.118.201.150	APBD

Analisa adanya pergeseran anggaran yang ditampung dalam Perubahan Peraturan APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada Program ini sebesar Rp. 5.253.635.113,- berkurang menjadi Rp. 4.788.744.528,-
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
   Anggaran pada Program ini sebesar Rp. 2.959.940.840,- berkurang menjadi Rp. 2.541.221.540,-
3. Program Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
   Anggaran pada Program ini sebesar Rp5.358.948.000,- berkurang menjadi Rp. 3.573.592.000,-
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
   Anggaran pada Program ini sebesar Rp. 927.182.100,- berkurang menjadi Rp. 1.434.254.200,-

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

   Anggaran pada Program ini sebesar Rp.502.393.350,- berkurang menjadi Rp.303.792.550,-

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

   Anggaran pada Program ini sebesar Rp.1.118.201.150,- berkurang menjadi Rp.1.011.137.250,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Kriteria Nilai Capaian

No.	Interval Nilai Capaian	Capaian
1.	**≥ 91%**	Tercapai
2.	**80% ≤ 90%**	Tercapai dengan catatan
3.	**< 80%**	Tidak Tercapai

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk secara berkelanjutan melaksanakan berbagai upaya strategis dalam rangka menciptakan situasi daerah yang aman, nyaman, dan kondusif sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan daerah. Upaya tersebut dilaksanakan secara terintegrasi melalui pencegahan dan penanganan konflik sosial, penguatan kesadaran politik masyarakat, serta penguatan tatanan sosial politik yang demokratis dan harmonis.

Dalam aspek pencegahan dan penanganan konflik sosial, Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengedepankan pendekatan preventif melalui pemetaan dan deteksi dini potensi gangguan dan konflik sosial. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan Forkopimda, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pendekatan mediasi, dialog, dan musyawarah menjadi strategi utama dalam penyelesaian konflik sehingga persentase potensi gangguan dan konflik sosial yang teratasi maupun tertangani dapat terus meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran politik dan pendidikan kewarganegaraan**,** Pemerintah Kabupaten Nganjuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi kewarganegaraan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai struktur pemerintahan, proses demokrasi, serta hak dan kewajiban politik warga negara, sehingga mendorong partisipasi politik yang cerdas, bertanggung jawab, dan beretika.

Upaya penguatan tatanan sosial politik yang demokratis dan harmonis dilakukan melalui fasilitasi dialog lintas agama, pembinaan toleransi, serta penguatan moderasi beragama di tengah masyarakat. Hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama, yang didukung oleh meningkatnya nilai toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar umat beragama. Pemerintah daerah secara aktif memfasilitasi ruang interaksi dan kerja sama antar kelompok keagamaan untuk memperkuat kohesi sosial dan mencegah potensi konflik berbasis SARA.

Selain itu**,** peningkatan kapasitas lembaga demokrasi menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim politik yang sehat dan kondusif. Pemerintah Kabupaten Nganjuk mendorong penguatan peran lembaga-lembaga demokrasi melalui fasilitasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan.

Upaya tersebut berdampak pada meningkatnya skor capaian kinerja kapasitas lembaga demokrasi, yang menunjukkan semakin berfungsinya sistem demokrasi secara efektif dan akuntabel.

Melalui sinergi kebijakan, penguatan kelembagaan, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus berupaya menciptakan kondisi daerah yang kondusif, harmonis, dan demokratis sebagai fondasi utama bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

3.1.1. Perbandingan Target dan realisasi Kinerja

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (100%)
1	2	3	4	5	6
Sasaran : 1. Meningkatnya pencegahan konflik sosial	Persentase potensi/gangguan konflik sosial yang teratasi	Renstra 2024-2026	94%	100%	106,38%
2. Meningkatkan penanganan konflik sosial	Persentase konflik sosial yang tertangani	Renstra 2024-2026	82%	100%	121,95%
3. Meningkatnya kesadaran politik dan Pendidikan Kewarganegaraan	Persentase pengetahuan masyarakat tentang struktur pemerintahan, proses dan hak politik	Renstra 2024-2026	82%	99,88%	121,80%
Tujuan 1. Meningkatnya tatanan sosial politik yang demokratis dalam kehidupan berbangsa yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	79,29	82,34	103,85%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (100%)
1	2	3	4	5	6
Sasaran : 1. Meningkatnya Nilai toleransi keagamaan	Nilai Indeks Toleransi Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	79,13	82,97	104,85%
2. Menigkatnya Nilai Kesetaraan umat beragama	Nilai Indeks kesetaraan umat beragama Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	79,42	81,85	103,06%
3. Meningkatnya Nilai Kerjasama umat beragama	Nilai Indeks kerjasama umat beragama Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	79,28	82,20	103,68%
4. Meningkatnya kapasitas Lembaga demokrasi	Skor capaian kinerja kapasitas lembaga demokrasi Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	79,93	79,93	100%

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa selama Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk selalu mengedepankan pencegahan konflik sehingga tidak mencuat menjadi konflik di masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, Konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Sasaran Perangkat Daerah berdasarkan Renstra 2024-2026 adalah:

a) Meningkatnya pencegahan konflik sosial dengan indikator kinerja adalah persentase potensi/gangguan konflik sosial yang teratasi. Fokus utama adalah pencegahan konflik sosial dengan program-program yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diantaranya melakukan pembinaan maupun sosialisasi kepada maasyarkat, koordinasi antar pimpinan daerah atau disebut dengan forkopimda, terbentuknya Tim Terpadu penganganan konflik, Tim Kewaspadaan Dini Daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama.

Target yang ditetapkan adalah 94%. Formulasi penghitungan dalah Jumlah potensi/gangguan konflik yang teratasi dibagi Jumlah potensi/gangguan konflik yang terjadi dikali 100 persen. Jumlah potensi konflik selama Tahun 2025 adalah 6 potensi konflik sedangkan jumlah potensi konflik yang teratasi adalah 6 potensi konflik. Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :

Realisasi Tahun 2025

$$\text{Rumus Perhitungan} = \frac{\text{Jumlah potensi gangguan/konflik yang teratasi}}{\text{Jumlah potensi gangguan/konflik yang terjadi}} = \frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

Data-data potensi konflik yang terjadi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Aksi unjuk rasa oleh LSM Salam Lima Jari Anti Korupsi Kab. Nganjuk. Laporan dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh PT Talenta Multi Kreasi Indonesia (TMKI), PT Aksa Energi Indonesia dan Sdr. Mulyono tambang Ds. Genjeng Kec. Loceret Kab. Nganjuk.
2. Aksi Damai oleh Ormas Pagar Jati Indonesia (OPJI) Kab. Nganjuk dengan tuntutan menyuarakan sikap ormas Pagar Jati Indonesia (OPJI) dan menuntut Pemerintah Daerah Kab. Nganjuk untuk bersikap tegas terhadap semua pihak yang menghalang-halangi investor berinvestasi di Kab. Nganjuk
3. Bipartit II (Perundingan) antara Pengurus SBTP-FSBI PT. Sinar Jaya Prima Perkasa dengan Pihak Management PT. Sinar Jaya Prima Perkasa terkait tuntutan pekerja/karyawan yang diikuti 8 orang pimpinan Sdr. Saifulloh (Ketua SBTP-FSBI PT. Dinar Jaya Prima Perkasa).

4. Aksi Pemberhentian Produksi Hari Kedua yang dilakukan oleh Serikat Buruh Tingkat Perusahaan Federasi Serikat Buruh Independen (SBTP F SBI) PT. Gunawan Fajar
5. Aksi Unras oleh Aliansi Masyarakat Dadapan (AMD) terkait dugaan penyalah gunakan wewenang dan Korupsi anggaran Dana Ds. Dadapan Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk
6. Pertemuan 20 orang perwakilan RT/RW Kab. Nganjuk yang tergabung dalam Aliansi RT/RW Menggugat dipimpin oleh Sdr. Sutriyono (Ketua Aliansi RT/RW Menggugat) dengan Komisi I DPRD Kab. Nganjuk dipimpin oleh Sdri. Anik Rahayu, SE (Wakil Ketua Komisi I) dalam rangka menanyakan jadwal hearring terkait aspirasi RT/RW yang meminta kenaikan insentif menjadi Rp. 500.000,- per bulan.

b) Meningkatkan penanganan konflik sosial dengan indikator kinerja adalah persentase konflik sosial yang tertangani dengan target 82%. Sampai dengan Akhir Tahun 2025, konflik sosial yang terjadi adalah 0 kejadian.
c) Meningkatnya kesadaran politik dan pendidikan kewarganegaraan dengan indikator persentase pengetahuan masyarakat tentang struktur pemerintahan, proses dan hak politik.

   Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan pendidikan politik yang terencana dan berkesinambungan, meliputi sosialisasi wawasan kebangsaan, etika dan budaya politik, serta fasilitasi pemahaman proses demokrasi. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan turut berperan dalam meningkatkan efektivitas penyampaian informasi dan edukasi politik.

   Target peserta kader partai sebanyak 15.100 orang, sedangkan yang mengikuti pelaksanaan kegiatan pendidikan politik sebanyak 15.083 sehingga realisasinya adalah 99,88%

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah berdasarkan RPJMD 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pencapaian tujuan diukur melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dengan target yang ditetapkan sebesar 79,29, dengan realisasi 82,34, sehingga capaian kinerja mencapai 103,85 persen. Hal ini menunjukkan kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Nganjuk berada pada kategori sangat tinggi.

Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 625 responden yang terdiri dari perempuan dengan persentase sebesar 54,88 persen (343 orang) dan 45,12 persen (282 orang) adalah laki-laki. responden kegiatan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 merupakan ibu rumah tangga dengan persentase sebesar 23,84 persen (149 orang), kemudian wirausaha sebesar 21,28 persen (133 orang), pegawai swasta sebesar 20,96 persen (131 orang). Sisanya 33,92 persen (212 orang) merupakan responden dengan berbagai macam profesi seperti ASN, buruh kasar/supir/tukang, pegawai pemerintah non pegawai petani/peternak/nelayan, negeri, profesional pelajar/mahasiswa, pensiunan, (pengacara/konsultan/lainnya), dan pekerjaan lainnya seperti rohaniawan, pemuka agama, pendeta, dan belum bekerja.

berdasarkan kedekatan dengan organisasi keagamaan, sebesar 41,44 persen (259 orang) tidak memiliki kedekatan dengan organisasi manapun, kemudian sebesar 58,56 persen (366 orang) dekat dengan organisasi keagamaan dari berbagai agama seperti Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Kejawen, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Paroki Santos Paulus, Badan Kerja Sama Antar Gereja, Gereja Kristen Jawi Wetan, Gereja Sidang Jemaat Jemaat Pantekosta (GSJP), Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.

Dari 625 orang responden yang di survei diketahui bahwa sebesar 11,68 persen (73 orang) tahu tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), sementara 88,32 persen (552 orang) lainnya tidak mengetahui tentang

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

Dari 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk, terdapat 11 kecamatan yang memperoleh nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di atas 80, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Kecamatan-kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Ngetos, Berbek, Loceret, Pace, Tanjunganom, Prambon, Kertosono, Patianrowo, Bagor, Rejoso, dan Ngluyu. Sementara itu, terdapat 9 kecamatan lainnya yang memperoleh nilai IKUB pada kisaran 75 hingga 79, yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Kecamatan Sawahan, Ngronggot, Baron, Gondang, Sukomoro, Nganjuk, Wilangan, Lengkong, dan Jatikalen.

a) Sasaran meningkatnya nilai toleransi keagamaan menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan target 79,13, realisasi 82,97, dan capaian 104,85 persen.

Dimensi toleransi disusun oleh 5 indikator yaitu (1) Hidup bertetangga dengan penganut agama lain; (2) Penganut agama lain beribadat sesuai agama dan keyakinannya; (3) Penganut agama lain membangun tempat ibadat di desa/kelurahan tempat tinggal anda setelah mendapat ijin pemerintah setempat; (4) Penganut agama lain melakukan perayaan di desa/kelurahan tempat tinggal anda; dan (5) Anak-anak anda bermain/berteman dengan anak anak penganut agama lain. Masing-masing indikator dikategorikan menjadi 4 tingkatan yaitu sangat keberatan, keberatan, tidak keberatan, dan sangat tidak keberatan.

Indikator (1), (2) dan (5), 100 persen responden memberikan jawaban tidak keberatan dan sangat tidak keberatan, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat toleransi yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal berinteraksi dan hidup berdampingan dengan penganut agama lain. Responden menunjukkan penerimaan penuh terhadap keberadaan dan aktivitas keagamaan pihak lain, baik dalam lingkungan tempat tinggal maupun dalam pergaulan sosial anak-anak mereka.

Sementara itu, pada indikator (3) yaitu penganut agama lain membangun tempat ibadat di desa/kelurahan tempat tinggal setelah

mendapat izin pemerintah setempat, masih terdapat sebagian kecil responden (sekitar 2,24 persen) yang menyatakan keberatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum masyarakat bersikap terbuka, masih ada sebagian kecil individu yang memiliki kekhawatiran atau ketidaknyamanan terhadap pembangunan rumah ibadah agama lain di lingkungan mereka.

Selain itu, pada indikator (4) yaitu penganut agama lain melakukan perayaan di desa/kelurahan tempat tinggal, hampir seluruh responden (99,84 persen) tidak keberatan, menandakan bahwa aktivitas keagamaan lintas agama di lingkungan masyarakat dapat diterima dengan baik dan tidak menimbulkan gesekan sosia

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa dimensi toleransi berada dalam kategori sangat baik, dengan masyarakat menunjukkan sikap terbuka, saling menghormati, dan menerima keberagaman agama dalam kehidupan bermasyarakat.

b) Sasaran meningkatnya nilai kesetaraan umat beragama menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan target 79,42, realisasi 81,85, dan capaian kinerja 103,06 persen.

Dimensi kesetaraan disusun oleh 7 indikator yaitu (1) Semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya (sesuai peraturan perundangan yang berlaku); (2) Setiap warga negara sama di muka hukum, apapun agamanya; (3) Setiap warga negara memiliki hak mendapatkan layanan publik yang sama, apapun agamanya; (4) Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, apapun agamanya; (5) Setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya; (6) Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati/Kepala Desa); (7) Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Presiden Republik Indonesia. Masing-masing indikator dikategorikan menjadi 4 tingkatan yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju.

Pada dimensi kesetaraan, terlihat bahwa indikator (1), (2), (3), (4), dan (5), seluruh responden (100 persen) menyatakan setuju dan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kesadaran kuat mengenai pentingnya perlakuan yang sama di muka hukum, hak atas layanan publik, pekerjaan, serta pendidikan tanpa membedakan agama. Namun, pada indikator (6) dan (7) yaitu hak menjadi kepala daerah dan hak menjadi Presiden Republik Indonesia bagi warga negara apapun agamanya, masih terdapat sebagian kecil responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju, masing-masing sebesar 3,36 persen dan 5,28 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum sepenuhnya menerima kesetaraan dalam konteks kepemimpinan politik tingkat tinggi, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, atau pemahaman keagamaan tertenttu.

Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai kesetaraan antar umat beragama telah tertanam kuat dalam masyarakat, terutama dalam hal akses terhadap hak-hak dasar warga negara. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi lebih lanjut mengenai prinsip persamaan hak dan kewarganegaraan tanpa diskriminasi agama, agar pemahaman kesetaraan dapat diterima secara lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.

c) Sasaran meningkatnya nilai kerja sama antar umat beragama melampaui target, dengan capaian kinerja sebesar 103,68 persen, yang mencerminkan kuatnya interaksi dan kolaborasi antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat.

Dimensi kerjasama disusun oleh 7 indikator yaitu (1) Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan/sosial yang melibatkan penganut agama lain seperti perayaan kemerdekaan, kerja bakti, temu warga, pembagian sembako dan sebagainya; (2) Bersama-sama penganut agama lain membantu orang yang mengalami kesulitan atau musibah; (3) Membantu penganut agama lain yang membutuhkan bantuan (misal: perayaan

keagamaan/pesta/pernikahan/dan lain-lain; (4) Melakukan jual beli/transaksi dengan orang yang berbeda agama; (5) Terlibat usaha yang dikelola bersama teman/kolega berbeda agama; (6) Terlibat usaha yang dikelola bersama teman/sahabat berbeda agama; (7) Berpartisipasi dalam organisasi yang melibatkan penganut agama lain seperti serikat buruh, serikat tani, klub olahraga, dan sebagainya. Masing-masing indikator dikategorikan menjadi 4 tingkatan yaitu sangat tidak bersedia, tidak bersedia, bersedia, dan sangat bersedia.

Seluruh responden (100 persen) menyatakan bersedia dan sangat bersedia pada indikator (1), (2), (4), (5), (6), dan (7). Hasil ini menunjukkan tingkat penerimaan yang sangat tinggi, yang mencerminkan bahwa masyarakat telah terbiasa menjalin hubungan sosial, bergotong royong, serta melakukan kerja sama ekonomi lintas agama sebagai sesuatu yang wajar dan diterima secara positif.

Namun pada indikator nomor (3) membantu penganut agama lain yang membutuhkan bantuan (misal perayaan keagamaan, pesta, pernikahan, dan sebagainya), masih terdapat responden yang memberikan jawaban tidak bersedia sebesar 2,72 persen, ini menunjukkan masih ada sebagian kecil masyarakat yang kurang terbuka dalam konteks sosial keagamaan tertentu.

Secara keseluruhan, hasil ini memberikan gambaran bahwa masyarakat memiliki tingkat kohesi sosial dan semangat kebersamaan yang kuat antar umat beragama. Nilai-nilai seperti saling membantu, bekerja sama, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial lintas agama telah menjadi bagian dari budaya hidup bermasyarakat. Namun demikian, perlu terus ditingkatkan pemahaman lintas agama terutama pada konteks kegiatan keagamaan, agar prinsip kerjasama dan solidaritas sosial dapat semakin merata di seluruh lapisan masyarakat.

d) Sasaran meningkatnya kapasitas lembaga demokrasi mencapai target secara optimal, dengan target dan realisasi masing-masing sebesar 79,93, sehingga capaian kinerja tercatat 100 persen.

Pada sasaran ini menjadi catatan penting, meskipun target mencapai 100% namun masih dalam kategori sedang (skor 79,93), beberapa indikator menunjukkan kelemahan yang cukup signifikan. Transparansi anggaran, khususnya dalam penyediaan informasi APBD di website pemerintah daerah, baru mencapai 50% dari target yang seharusnya. Hal ini berdampak pada terbatasnya akses masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah. Pendidikan partai politik, kinerja lembaga legislatif dan yudikatif secara umum berjalan baik, dengan tingkat penyelesaian perkara di pengadilan yang mencapai 100% dan produktivitas legislasi yang tinggi. Namun, perlu dicermati apakah kondisi ini benar-benar mencerminkan efektivitas lembaga atau justru rendahnya akses masyarakat terhadap proses hukum. Netralitas penyelenggara pemilu juga masih menjadi perhatian, meskipun jumlah kasus pelanggaran sangat kecil. Sementara itu, kualitas lingkungan hidup masih menjadi tantangan, terutama pada aspek kualitas air dan lahan yang berada pada kategori moderat

Komponen dari aspek kapasitas lembaga demokrasi terdiri dari :

- Kinerja Lembaga Legislatif

  Kinerja DPRD Kabupaten Nganjuk dalam pembentukan regulasi menunjukkan capaian yang cukup tinggi dengan 85,71% perda berhasil disahkan dari total 14 target Propemperda. Sebanyak 12 perda telah disahkan sepanjang tahun 2024, mencerminkan komitmen yang baik dalam menjalankan fungsi legislasi. Tingkat produktivitas ini menjadi indikator penting terhadap efektivitas peran lembaga legislatif daerah dalam merespons kebutuhan regulatif masyarakat.

- Kinerja Lembaga Yudikatif

  Data tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh perkara di Pengadilan Negeri telah selesai diputuskan sebesar 100% dan tidak terdapat kasus sisa atau kasus masuk pada tahun berjalan.

Meskipun ini mencerminkan efisiensi tinggi dalam penyelesaian perkara, perlu dicermati apakah kondisi ini mencerminkan rendahnya akses masyarakat terhadap lembaga peradilan atau memang mencerminkan stabilitas hukum yang baik di tingkat lokal.

- Netralitas Penyelenggaraan Pemilu

  Selama tahun 2024, tercatat satu kasus terkait keberpihakan penyelenggara pemilu. Meskipun jumlahnya kecil, keberadaan kasus tersebut tetap menjadi perhatian karena dapat memengaruhi persepsi publik terhadap netralitas dan integritas lembaga penyelenggara pemilu. Evaluasi internal dan sanksi yang transparan terhadap pelanggaran ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam proses demokrasi elektoral
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Terkait Kebijakan Pejabat Pemerintah

  Sepanjang tahun 2024, tidak ada putusan PTUN yang menyatakan kebijakan/keputusan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif, kebijakan daerah telah dijalankan tanpa sengketa hukum yang signifikan. Meski demikian, penting untuk terus memperkuat prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan partisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan agar potensi pelanggaran hukum administrasi tetap dapat dicegah.
- Jaminan Pmerintah/Pemerintah Daerah Terhadap Pelestarian Lingkungan dan Ruang Hidup Masyarakat.

  Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, kualitas lingkungan hidup daerah pada tahun 2024 menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar indikator. Indeks Kualitas Udara mencatat skor tertinggi sebesar 88,18, menandakan kondisi udara yang relatif baik.

Namun Indeks Kualitas Air sebesar 56,25 dan kualitas lahan sebesar 55,74 menunjukkan nilai yang masih moderat dan berpotensi mengindikasikan tekanan terhadap sumber daya alam akibat aktivitas manusia. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup keseluruhan sebesar 69,07 memperlihatkan bahwa meskipun ada upaya perlindungan, tantangan lingkungan masih perlu direspon serius. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik industri dan pertambangan, serta meningkatkan program konservasi lahan dan sanitasi air

- Transportasi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah

  Tingkat keterbukaan informasi APBD Kabupaten Nganjuk di website pemerintah daerah baru mencapai 50% dari indikator yang seharusnya tersedia. Informasi yang tersedia mencakup dokumen perencanaan anggaran seperti ringkasan RKA-SKPD, RKA-PPKD, serta Perda APBD dan Perubahannya**,** namun tidak tersedia data penting seperti DPA-SKPD, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Audit, maupun Opini atas Laporan Keuangan. Ketiadaan dokumen pelaporan dan pengawasan ini berdampak pada terbatasnya akses publik terhadap penggunaan anggaran yang sebenarnya telah berjalan.

  Kondisi ini menjadi catatan kritis karena transparansi anggaran merupakan fondasi penting dalam mendorong akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah perlu segera melengkapi dokumen pelaporan di kanal digital resmi untuk memenuhi prinsip *good governance*.
- Kinerja Birokrasi Dalam Pelayanan Publik

  Berdasarkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dari berbagai instansi pelayanan di Kabupaten Nganjuk tahun 2024,

nilai IPP tertinggi dicapai oleh Disdukcapil sebesar 4,62, diikuti oleh RSUD sebesar 4,56 dan Dinsos PPPA sebesar 4,53. Secara umum, rata-rata IPP Kabupaten Nganjuk tercatat pada angka 4,57 menunjukkan kinerja birokrasi yang cukup baik dalam menyediakan layanan dasar kepada masyarakat. Perbedaan nilai antar instansi menjadi indikator penting untuk identifikasi kualitas pelayanan yang perlu ditingkatkan, terutama pada instansi yang menyentuh kelompok rentan. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat inovasi layanan publik, penyederhanaan prosedur, dan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur untuk meningkatkan kepuasan masyarakat

- Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik

  Tingkat pelaksanaan pendidikan politik oleh partai-partai yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Nganjuk masih relatif rendah. Dari 10 partai politik yang ada, hanya 13,7% yang aktif melaksanakan kegiatan pendidikan politik, dengan total 137 kegiatan tercatat sepanjang tahun 2024. Rendahnya angka ini menunjukkan masih minimnya komitmen partai dalam mencetak kader yang paham demokrasi substansial.

  Padahal, pendidikan politik adalah fondasi penting dalam membentuk kultur politik yang sehat, partisipatif, dan anti korupsi. Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Bawaslu perlu mendorong partai politik agar lebih aktif memenuhi tanggung jawab pendidikannya melalui pendekatan regulatif maupun insentif.

3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terahkir

Berdasarkan Rencana Kinerja yang dilakukan pengendalian dan evaluasi renstra Perangkat daerah, maka pada Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan politik kabupaten Nganjuk menetapkan 3 target

sasaran OPD dengan didukung 6 Program. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa tahun Terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Sasaran 1 Meningkatnya stabilitas dan situasi daerah yang kondusif	Persentase penanganan Konflik Sosial dan kehidupan beragama	Perubahan Renstra 2018-2023	85%	90%	-	-	91%	100%	-	-
2	Sasaran 1 Peningkatan pencegahan, penanganan dan pemulihan pasca konflik	Persentase potensi gangguan/konflik yang teratasi	Renstra 2024-2026	-	-	93%	-	-	-	100%	-
3	Sasaran 1 Meningkatnya pencegahan konflik sosial	Persentase potensi/gangguan konflik sosial yang teratasi	Renstra 2024-2026	-	-	-	94%	-	-	-	100%
4	Sasaran 2 Meningkatkan penanganan konflik sosial	Persentase konflik sosial yang tertangani	Renstra 2024-2026	-	-	-	82%	-	-	-	100%
5	Sasaran 3 Meningkatnya kesadaran politik dan Pendidikan Kewarganegaraan	Persentase pengetahuan masyarakat tentang struktur pemerintahan, proses dan hak politik	Renstra 2024-2026	-	-	-	82%	-	-	-	99,88%
6	Tujuan : Meningkatnya tatanan sosial politik yang demokratis dalam kehidupan berbangsa yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	-	-	-	79,29	-	-	-	82,34

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Sasaran 1 : Meningkatnya Nilai toleransi keagamaan	Nilai Indeks Toleransi Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	-	-	-	79,13	-	-	-	82,97
8	Sasaran 2 : Menigkatnya Nilai Kesetaraan umat beragama	indikator Nilai Indeks kesetaraan umat beragama Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	-	-	-	79,42	-	-	-	81,85
9	Sasaran 3 : Meningkatnya Nilai Kerjasama umat beragama	Nilai Indeks kerjasama umat beragama Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	-	-	-	79,28	-	-	-	82,20
10	Sasaran 4 : Meningkatnya kapasitas Lembaga demokrasi	Skor capaian kinerja kapasitas lembaga demokrasi Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	-	-	-	79,93	-	-	-	79,93

Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Dalam hal ini diprioritaskan upaya pencegahan konflik melalui program dan kegiatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan tabel 3.3 tersebut maka kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami peningkatan, hal ini merupakan kerja keras untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dari tahun ke tahun selalu berupaya menangani konflik sosial melalui upaya pencegahan.

1) Pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 85%, realisasinya adalah 91%. Data tersebut didapat dari laporan selama tahun 2022 yaitu sebanyak 11 permasalahan dan 1 permasalahan yang belum

tertangani diakibatkan terjadinya pro dan kontra diantara masyarakat dimana hal tersebut memicu demo tandingan.

2) Pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 90%, realisasinya adalah 100%. Data tersebut didapat dari 6 konflik/potensi konflik dimana keenam potensi konflik tersebut telah tertangani.
3) Berdasarkan Renja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk, target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 93%. Formulasi penghitungan adalah Jumlah potensi/gangguan konflik yang teratasi dibagi Jumlah potensi/gangguan konflik yang terjadi dikali 100 persen. Jumlah potensi konflik adalah 11 potensi konflik sedangkan jumlah potensi konflik yang teratasi adalah 11 potensi konflik.
4) Pada Tahun 2025 merupakan peralihan dari Renstra 2024-2026 ke Renstra 2025-2029.

   Pelaksanaan Renstra Tahun 2024–2026 diarahkan pada peningkatan stabilitas sosial dan penguatan kesadaran politik masyarakat.

   a) Pada Sasaran meningkatnya pencegahan konflik sosial, capaian kinerja ditunjukkan melalui persentase potensi atau gangguan konflik sosial yang berhasil diatasi, dengan target sebesar 94 persen dan realisasi capaian mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya deteksi dini, koordinasi, serta langkah preventif telah berjalan secara optimal.
   b) Pada Sasaran meningkatnya penanganan konflik sosial, capaian kinerja diukur melalui persentase konflik sosial yang tertangani dengan target sebesar 82 persen dan realisasi mencapai 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas penanganan konflik melalui koordinasi lintas sektor serta penyelesaian konflik secara cepat dan tepat.
   c) Pada Sasaran meningkatnya kesadaran politik dan pendidikan kewarganegaraan, capaian kinerja diukur melalui persentase

pengetahuan masyarakat mengenai struktur pemerintahan, proses politik, dan hak politik. Target yang ditetapkan sebesar 82 persen dengan realisasi sebesar 99,88 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat telah berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kehidupan demokrasi.

Dalam rangka mewujudkan tatanan sosial politik yang demokratis dan harmonis, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menetapkan sejumlah indikator strategis untuk periode 2025–2029. Secara umum, capaian realisasi menunjukkan tren positif dengan beberapa indikator melampaui target yang ditetapkan.

a) **Indeks Kerukunan Umat Beragama**

Target tahun 2025 sebesar 79,29, sedangkan realisasi mencapai 82,34. Hal ini menunjukkan tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Nganjuk berada di atas ekspektasi, mencerminkan keberhasilan program pembinaan kerukunan dan dialog antarumat beragama.

b) **Indeks Toleransi Keagamaan**

Target tahun 2025 sebesar 79,13, sedangkan realisasi mencapai 82,97. Capaian ini melampaui target, menandakan meningkatnya sikap toleransi masyarakat terhadap perbedaan keyakinan, yang menjadi fondasi penting bagi kehidupan sosial politik yang harmonis.

c) **Indeks Kesetaraan Umat Beragama**

Target tahun 2025 sebesar 79,42, sementara realisasi mencapai 81,85. Capaian ini melampaui target, menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kesetaraan antarumat beragama, hasil dari kebijakan inklusif dan fasilitasi pemerintah daerah.

d) **Indeks Kerjasama Umat Beragama**

Target tahun 2025 sebesar 79,28, dengan realisasi 82,20. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan nyata dalam kerjasama lintas

agama, yang memperkuat kohesi sosial dan mendukung stabilitas politik daerah.

e) **Skor Kapasitas Lembaga Demokrasi**

Target tahun 2025 sebesar 79,93, dengan realisasi sama yaitu 79,93. Hal ini menunjukkan capaian sesuai target, meskipun masih perlu penguatan kapasitas kelembagaan agar tren peningkatan berlanjut di tahun-tahun berikutnya.

3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir pada Dokumen Renstra.

Tabel 3.4

Target Kinerja Berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target Renstra (Tahun)						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sasaran 1: Meningkatnya pencegahan konflik sosial	Persentase potensi/gangguan konflik sosial yang teratasi	Renstra 2024-2026	93	94	95	-	-	-	-
2	Sasaran 2: Meningkatkan penanganan konflik sosial	Persentase konflik sosial yang tertangani	Renstra 2024-2026	82	82	84	-	-	-	-
3	Sasaran 3: Meningkatnya kesadaran politik dan Pendidikan Kewarganegaraan	Persentase pengetahuan masyarakat tentang struktur pemerintahan, proses dan hak politik	Renstra 2024-2026	80	82	83	-	-	-	-
4	Tujuan : Meningkatnya tatanan sosial politik yang demokratis dalam kehidupan berbangsa yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	-	79,29	79,34	79,39	79,44	75,5	79,55
5	Sasaran 1 : Meningkatnya Nilai toleransi keagamaan	Nilai Indeks Toleransi Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	-	79,13	79,15	79,17	79,19	79,21	79,23

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target Renstra (Tahun)						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Sasaran 2 : Menigkatnya Nilai Kesetaraan umat beragama	indikator Nilai Indeks kesetaraan umat beragama Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	-	79,42	79,44	79,46	79,48	79,5	79,52
7	Sasaran 3 : Meningkatnya Nilai Kerjasama umat beragama	Nilai Indeks kerjasama umat beragama Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	-	79,28	79,3	79,32	79,34	79,36	79,38
8	Sasaran 4 : Meningkatnya kapasitas Lembaga demokrasi	Skor capaian kinerja kapasitas lembaga demokrasi Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	-	79,93	80,18	80,43	80,68	80,93	81,18

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target Akhir Tahun Renstra - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Realisasi Tahun 2025	Tingkat kemajuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Sasaran 1: Meningkatnya pencegahan konflik sosial	Persentase potensi/gangguan konflik sosial yang teratasi	Renstra 2024-2026	95%	100	105,26%
2	Sasaran 2: Meningkatkan penanganan konflik sosial	Persentase konflik sosial yang tertangani	Renstra 2024-2026	84%	100	119,05%
3	Sasaran 3: Meningkatnya kesadaran politik dan Pendidikan Kewarganegaraan	Persentase pengetahuan masyarakat tentang struktur pemerintahan, proses dan hak politik	Renstra 2024-2026	83%	99.88%	120,34
4	Tujuan : Meningkatnya tatanan sosial politik yang demokratis dalam kehidupan berbangsa yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	79,55	82,34	103,51%
5	Sasaran 1 : Meningkatnya Nilai toleransi keagamaan	Nilai Indeks Toleransi Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	79,23	82,97	104,72%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target Akhir Tahun Renstra - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Realisasi Tahun 2025	Tingkat kemajuan
1	2	3	4	5	6	7
6	Sasaran 2 : Menigkatnya Nilai Kesetaraan umat beragama	Nilai Indeks kesetaraan umat beragama	Renstra 2025-2029	79,52	81,85	102,93%
7	Sasaran 3 : Meningkatnya Nilai Kerjasama umat beragama	Nilai Indeks kerjasama umat beragama Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	79,38	82,20	103,55%
8	Sasaran 4 : Meningkatnya kapasitas Lembaga demokrasi	Skor capaian kinerja kapasitas lembaga demokrasi Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	81,18	79,93	98,46%

Berdasarkan Renstra 2024-2026

1) Sasaran meningkatnya pencegahan konflik sosial melalui indikator persentase potensi/gangguan konflik sosial yang teratasi menunjukkan kinerja yang sangat baik. Target sebesar 95% diakhir Tahun renstra dapat direalisasikan sepenuhnya sebesar 100 persen, sehingga tingkat kemajuan mencapai 105,26%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh potensi gangguan dan konflik sosial yang teridentifikasi dapat ditangani secara optimal.
2) Sasaran meningkatkan penanganan konflik sosial melalui indikator persentase konflik sosial yang tertangani juga menunjukkan capaian yang optimal. Target sebesar 84% di akhir Tahun renstra dapat direalisasikan 100%, sehingga tingkat kemajuan mencapai 119,05%, yang menggambarkan efektivitas koordinasi dan respons penanganan konflik di daerah.
3) Sasaran meningkatnya kesadaran politik dan pendidikan kewarganegaraan melalui indikator persentase pengetahuan masyarakat tentang struktur pemerintahan, proses, dan hak politik menunjukkan tingkat kemajuan yang sangat tinggi. Dari target sebesar 83%, realisasi kinerja mencapai 99,88%. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap

pendidikan politik sudah sangat baik, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai pemenuhan target secara sempurna.

Berdasarkan Renstra 2025-2029,

Tingkat kemajuan terhadap tujuan meningkatnya tatanan sosial politik yang demokratis dalam kehidupan berbangsa yang harmonis menunjukkan capaian yang sangat baik.

4) Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk, target Akhir Renstra 2025–2029 sebesar 79,55 berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar 82,34. Capaian tersebut menghasilkan tingkat kemajuan sebesar 103,51 persen, yang menunjukkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Nganjuk berada pada kategori sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan.
5) Sasaran meningkatnya nilai toleransi keagamaan melalui indikator Nilai Indeks Toleransi Kabupaten Nganjuk menunjukkan capaian yang melampaui target. Dari target akhir renstra sebesar 79,23, realisasi kinerja tercapai sebesar 82,97, sehingga tingkat kemajuan mencapai 104,72 persen. Hal ini menunjukkan meningkatnya sikap toleransi keagamaan di tengah masyarakat.
6) Sasaran meningkatnya nilai kesetaraan umat beragama melalui indikator Nilai Indeks Kesetaraan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk menunjukkan hasil yang sangat positif. Target Akhir Renstra sebesar 79,52 dapat direalisasikan sebesar 81,85, dengan tingkat kemajuan mencapai 102,93 persen. Hal ini mencerminkan semakin menguatnya kesetaraan antar umat beragama dalam kehidupan sosial masyarakat.
7) Sasaran meningkatnya nilai kerja sama umat beragama melalui indikator Nilai Indeks Kerja Sama Umat Beragama Kabupaten Nganjuk juga menunjukkan hasil yang sangat baik. Target akhir

renstra sebesar 79,38 dapat direalisasikan sebesar 82,20, dengan tingkat kemajuan mencapai 103,55 persen. Capaian ini menggambarkan semakin kuatnya kerja sama antar umat beragama dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

8) Sasaran meningkatnya kapasitas lembaga demokrasi melalui indikator Skor capaian kinerja kapasitas lembaga demokrasi Kabupaten Nganjuk menunjukkan capaian yang cukup baik. Dari target Akhir Renstra sebesar 81,18 persen, realisasi kinerja tercapai sebesar 79,93, sehingga tingkat kemajuan mencapai 98,46 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kapasitas lembaga demokrasi telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan.

3.1.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional
(Berdasarkan Renstra 2024-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standard Nasional/Provinsi/Kab/Kota Daerah Lain*)	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Posisi Kinerja
1	2	3	4	5	6
	Bakesbangpol Kab. Nganjuk				
1	Sasaran : Meningkatnya pencegahan konflik sosial	Persentase potensi/gangguan konflik sosial yang teratasi	-	100%	Diatas Bakesbangpol Madiun
	Meningkatkan penanganan konflik sosial	Persentase konflik sosial yang tertangani	-	100%	Setara Bakesbangpol Kab. Blitar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standard Nasional/Provinsi/Kab/Kota Daerah Lain*)	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Posisi Kinerja
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya kesadaran politik dan Pendidikan Kewarganegaraan	Persentase pengetahuan masyarakat tentang struktur pemerintahan, proses dan hak politik	-	99,88%	-
	Bakesbangpol Kab. Madiun				
2.	Sasaran : Meningkatnya Deteksi Dini terhadap Potensi Konflik di Wilayah	Persentase Pencegahan Konflik	-	82,76%	
	Bakesbangpol Kab. Blitar				
3.	Sasaran : Meningkatnya penanganan konflik sosial di masyarakat	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	-	100%	

Setelah diperoleh perbandingan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, langkah berikutnya adalah membandingkan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dengan standar nasional. Akan tetapi karena standar nasional realisasi kinerja belum ada, maka belum dapat dilakukan proses perbandingannya. Selanjutnya adalah membandingkan dengan Provinsi, namun terdapat kesulitan dalam memperoleh data laporan. Maka akan dibandingkan dengan Kab/kota daerah lain yang mudah didapat datanya melalui website masing-masing daerah dengan kemiripan indikator dan dituangkan pada tabel diatas.

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bakesbangpol Kabupaten Madiun

   Indikator Persentase Pencegahan Konflik digunakan untuk mengukur efektivitas upaya yang dilakukan dalam mencegah konflik sosial, baik yang bersifat horizontal (antar kelompok masyarakat) maupun vertikal (antara masyarakat dan pemerintah). Indikator ini membantu menilai sejauh mana intervensi yang dilakukan dapat mengurangi potensi konflik sebelum berkembang menjadi perselisihan terbuka. Di tahun 2024, persentase pencegahan konflik sebesar 82,76% atau mencapai 103,45% dari target sebesar 80%.

2. Bakesbangpol Kab. Blitar

   Pencapaian dari sasaran strategis ini diukur dengan indikator yaitu tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat. Pencapaian Kinerja sasaran pada tahun 2024 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat penanganan konflik sosial di Masyarakat telah mencapai target yang telah ditentukan. Adapun hasil ini dapat dijelaskan dari formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah konflik sosial di masyarakat yang ditangani}}{\text{Jumlah konflik sosial yang terjadi}} \times 100$$

$$= \frac{11}{11} \times 100 = 100\%$$

   Pada tahun 2024 jumlah kejadian yang menonjol yang terjadi sebanyak 11 kejadian dan dari 11 kejadian tersebut semuanya dapat terselesaikan dengan mediasi dan koordinasi dengan pihak – pihak terkait.

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

(Berdasarkan Renstra 2025-2029)

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Standard Nasional/Provinsi/Kab/Kota Daerah Lain*)	Realisasi Kinerja Tahun 2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Bakesbangpol Kab. Nganjuk	Tujuan : Meningkatnya tatanan sosial politik yang demokratis dalam kehidupan berbangsa yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk	-	82,34
		Sasaran 1 : Meningkatnya Nilai toleransi keagamaan	Nilai Indeks Toleransi Kabupaten Nganjuk	-	82,97
		Sasaran 2 : Menigkatnya Nilai Kesetaraan umat beragama	indikator Nilai Indeks kesetaraan umat beragama Kabupaten Nganjuk	-	81,85
		Sasaran 3 : Meningkatnya Nilai Kerjasama umat beragama	Nilai Indeks kerjasama umat beragama Kabupaten Nganjuk	-	82,20
		Sasaran 4 : Meningkatnya kapasitas Lembaga demokrasi	Skor capaian kinerja kapasitas lembaga demokrasi Kabupaten Nganjuk	-	79,93
2,	Kementerian Agama *)		IKUB Nasional	-	77,89
			Aspek Toleransi	-	88,82
			Aspek Kesetaraan	-	79,35
			Aspek kerjasama	-	65,49
3	Provinsi Jawa Timur**)		Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	-	78,46

Sumber data : *) https://bimaskristen.kemenag.go.id/news-1711-indeks-kerukunan-umat-beragama-naik-tertinggi-dalam-11-tahun.html

**) https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE2MCMy/-metode-baru--aspek-indeks-demokrasi-indonesia--idi--menurut-provinsi.html?utm_source=chatgpt.com

Dalam rangka mewujudkan **tatanan sosial politik yang demokratis dalam kehidupan berbangsa yang harmonis**, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang **cukup menonjol bila dibandingkan dengan capaian nasional**.

Pada indikator **Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**, Kabupaten Nganjuk mencatat nilai **82,34**, yang berada **di atas IKUB Nasional sebesar 77,89** sebagaimana dirilis oleh Kementerian Agama RI. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Nganjuk relatif lebih kondusif dibandingkan rata-rata nasional. Keunggulan ini mencerminkan efektivitas peran pemerintah daerah bersama FKUB, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga harmoni sosial berbasis toleransi dan dialog antarumat beragama.

Nilai Indeks Toleransi Kabupaten Nganjuk sebesar 82,97 meskipun masih berada di bawah **aspek toleransi nasional (88,82)**, tetap menunjukkan kondisi toleransi yang baik dan stabil. Hal ini menjadi indikator bahwa praktik toleransi di masyarakat telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan melalui edukasi moderasi beragama dan dialog lintas iman yang lebih intensif.

Ditinjau dari aspek-aspek pembentuk IKUB, capaian **Nilai Indeks Kesetaraan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk sebesar 81,85** juga lebih tinggi dibandingkan **aspek kesetaraan nasional yang berada pada angka 79,35**. Hal ini menunjukkan adanya jaminan perlakuan yang relatif setara antarumat beragama di daerah, baik dalam aspek pelayanan publik maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pada **Nilai Indeks Kerjasama Umat Beragama**, Kabupaten Nganjuk mencatat nilai **82,20**, yang secara signifikan **lebih tinggi dibandingkan aspek kerjasama nasional sebesar 65,49**. Capaian ini mengindikasikan kuatnya kolaborasi antarumat beragama dalam kegiatan sosial, kebangsaan, dan pembangunan daerah.

Pada aspek **kapasitas lembaga demokrasi**, Kabupaten Nganjuk mencatat skor **79,93**, yang masih **sedikit di atas aspek kapasitas lembaga demokrasi Provinsi Jawa Timur sebesar 78,46**, namun belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan berkelanjutan terhadap kelembagaan demokrasi, khususnya dalam peningkatan kapasitas SDM, tata kelola organisasi, dan sinergi antar-pemangku kepentingan.

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi yang akan dilakukan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Faktor Pendukung atau Penghambat	Alternatif Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Sasaran 1** Meningkatnya pencegahan konflik sosial	Persentase potensi/ gangguan konflik sosial yang teratasi	Renstra 2024-2026	94%	100%	106,38 %	Pelaksanaan pencegahan konflik yang terencana dan partisipasi masyarakat	-
2	**Sasaran 2** Meningkatkan penanganan konflik sosial	Persentase konflik sosial yang tertangani	Renstra 2024-2026	82%	100%	121,95%	Prosedur penanganan konflik yang jelas dan sinergi aparat keamanan	-
3	**Sasaran 3** Meningkatnya kesadaran politik dan Pendidikan Kewarganegaraan	Persentase pengetahuan masyarakat tentang struktur pemerintahan, proses dan hak politik	Renstra 2024-2026	82%	99,88%	121,8%	Intensitas pendidikan politik dan pemanfaatan media sosialisasi	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Faktor Pendukung atau Penghambat	Alternatif Solusi
4	**Tujuan** Meningkatnya tatanan sosial politik yang demokratis dalam kehidupan berbangsa yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	79,29	82,34	103,85%	Peran aktif FKUB dan dialog lintas umat beragama	-.
5	**Sasaran 1** Meningkatnya Nilai toleransi keagamaan	Nilai Indeks Toleransi Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	79,13	82,97	104,85%	Terbangunnya sikap saling menghormati antarumat beragama	-
6	**Sasaran 2** Menigkatnya Nilai Kesetaraan umat beragama	indikator Nilai Indeks kesetaraan umat beragama Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	79,42	81,85	103,06%	Terjaminnya perlakuan setara antarumat beragama	-
7	**Sasaran 3** Meningkatnya Nilai Kerjasama umat beragama	Nilai Indeks kerjasama umat beragama Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	79,28	82,20	103,68%	Tingginya kolaborasi antarumat beragama dalam kegiatan sosial	-
8	**Sasaran 4** Meningkatnya kapasitas Lembaga demokrasi	Skor capaian kinerja kapasitas lembaga demokrasi Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	79,93	79,93	100%	Optimalnya fasilitasi dan koordinasi kelembagaan	-

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, secara umum seluruh sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk telah tercapai, bahkan sebagian besar indikator menunjukkan capaian melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

1. Indikator Persentase Potensi/Gangguan Konflik Sosial yang Teratasi mencapai 106,38 persen. Hal ini mencerminkan efektivitas upaya pencegahan konflik yang tidak hanya memenuhi target, namun melampauinya.
2. Persentase Konflik Sosial yang Tertangani mencapai 121,95 persen.

3. Indikator Persentase Pengetahuan Masyarakat tentang Struktur Pemerintahan, Proses dan Hak Politik juga mencatat capaian 121,8 persen, hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran politik dan pendidikan kewarganegaraan di masyarakat.

Keberhasilan pada sasaran ini dipengaruhi oleh:

- Intensifnya kegiatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan;
- Pelibatan aktif masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pemuda;
- Pemanfaatan berbagai media sosialisasi yang adaptif dan menjangkau luas.

Upaya tindak lanjut diarahkan pada penguatan metode edukasi politik yang lebih inklusif dan berkelanjutan, khususnya bagi pemilih pemula dan kelompok strategis.

4. Tujuan: Meningkatnya Tatanan Sosial Politik yang Demokratis dan Harmonis

Pada tujuan ini, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Nganjuk mencapai 103,85 persen, yang berstatus tercapai. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kondisi sosial politik daerah berada dalam kategori baik dan stabil.

Keberhasilan ini didukung oleh:

- Peran aktif Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- Konsistensi dialog lintas agama;
- Iklim demokrasi lokal yang kondusif dan partisipatif.

4. Sasaran Peningkatan Nilai-Nilai Kerukunan dan Demokrasi

Seluruh sasaran turunan pada tujuan ini menunjukkan capaian yang melampaui target, yaitu:

- Nilai Indeks Toleransi Keagamaan sebesar 104,85 persen;
- Nilai Indeks Kesetaraan Umat Beragama sebesar 103,06 persen;
- Nilai Indeks Kerjasama Umat Beragama sebesar 103,68 persen;
- Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 100 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk telah berjalan efektif dalam memperkuat nilai toleransi, kesetaraan, kerja sama, serta kapasitas kelembagaan demokrasi di daerah.

Sebagai upaya tindak lanjut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk akan terus:

- Meningkatkan kualitas fasilitasi kelembagaan keagamaan dan demokrasi;
- Memperkuat sinergi antarumat beragama dan pemangku kepentingan;
- Mengembangkan inovasi program untuk menjaga keberlanjutan kerukunan dan stabilitas sosial politik daerah.

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

TABEL 3.9
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Sasaran 1 Meningkatnya pencegahan konflik sosial	Persentase potensi/gangguan konflik sosial yang teratasi	Renstra 2024-2026	106,38	94,43	11,95
2	Sasaran 2 Meningkatkan penanganan konflik sosial	Persentase konflik sosial yang tertangani	Renstra 2024-2026	121,95	94,43	27,52
3	Sasaran 3 Meningkatnya kesadaran politik dan Pendidikan Kewarganegaraan	Persentase pengetahuan masyarakat tentang struktur pemerintahan, proses dan hak politik	Renstra 2024-2026	121,8	94,43	27,37
4	Tujuan Meningkatnya tatanan sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Renstra 2025-2029	103,85	94,43	9,42

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7
	politik yang demokratis dalam kehidupan berbangsa yang harmonis	Kabupaten Nganjuk				
5	Sasaran 1 Meningkatnya Nilai toleransi keagamaan	Nilai Indeks Toleransi Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	104,85	94,43	10,42
6	Sasaran 2 Menigkatnya Nilai Kesetaraan umat beragama	indikator Nilai Indeks kesetaraan umat beragama Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	103,06	94,43	8,63
7	Sasaran 3 Meningkatnya Nilai Kerjasama umat beragama	Nilai Indeks kerjasama umat beragama Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	103,68	94,43	9,25
8	Sasaran 4 Meningkatnya kapasitas Lembaga demokrasi	Skor capaian kinerja kapasitas lembaga demokrasi Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	100	94,43	5,57

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun pelaksanaan Renstra 2024–2026 dan Renstra 2025–2029, secara umum capaian kinerja perangkat daerah menunjukkan hasil yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif serta didukung pengelolaan anggaran yang efisien.

- Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pencegahan Konflik Sosial, indikator *Persentase potensi/gangguan konflik sosial yang teratasi* memperoleh capaian kinerja sebesar 106,38% dengan realisasi anggaran sebesar 94,43%, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 11,95%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya deteksi dini, koordinasi lintas sektor, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial politik telah berjalan optimal.

- Selanjutnya pada Sasaran Strategis Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial, indikator Persentase konflik sosial yang tertangani mencapai kinerja sebesar 121,95% dengan realisasi anggaran 94,43% dan efisiensi sebesar 27,52%. Hal ini mencerminkan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan mediasi, fasilitasi penyelesaian konflik, serta penguatan koordinasi dengan unsur Forkopimda dan stakeholder terkait.
- Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kesadaran Politik dan Pendidikan Kewarganegaraan, indikator Persentase pengetahuan masyarakat tentang struktur pemerintahan, proses, dan hak politik mencapai 121,8% dengan realisasi anggaran 94,43% serta efisiensi 27,37%. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi, partisipasi politik, serta kesadaran berbangsa dan bernegara.
- Dalam mendukung Tujuan Meningkatnya Tatanan Sosial Politik yang Demokratis dalam Kehidupan Berbangsa yang Harmonis, indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk mencapai 103,85% dengan realisasi anggaran 94,43% dan efisiensi 9,42%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Nganjuk tetap terjaga dengan baik melalui sinergi antar umat beragama, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah.
- Sasaran Meningkatnya Nilai Toleransi Keagamaan mencapai 104,85% dengan efisiensi 10,42%.
- Sasaran Meningkatnya Nilai Kesetaraan Umat Beragama mencapai 103,06% dengan efisiensi 8,63%, yang menunjukkan meningkatnya sikap saling menghargai antar pemeluk agama.
- Sasaran Meningkatnya Nilai Kerjasama Umat Beragama mencapai 103,68% dengan efisiensi 9,25%. Capaian ini menunjukkan bahwa

hubungan antar umat beragama di Kabupaten Nganjuk semakin harmonis dan kolaboratif.

- Sasaran Meningkatnya Kapasitas Lembaga Demokrasi memperoleh capaian 100% dengan efisiensi 5,57%, mencerminkan stabilitas dan optimalnya peran kelembagaan demokrasi di daerah.

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja yang melampaui target dengan tingkat efisiensi anggaran yang baik menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif, efisien, serta memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas sosial politik dan memperkuat kehidupan demokrasi di Kabupaten Nganjuk.

3.1.7. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.10

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan, Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sasaran : Meningkatnya pencegahan konflik sosial	Persentase potensi/gangguan konflik sosial yang teratasi	Renstra 2024-2026			94%	100%	106,38
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaaan	85%	91,37%	107,49%
				Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mengikuti Penguatan ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	3.000 org	2.741 org	91,37%
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase peningkatan dan pemahaman masyarakat terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	80%	92,40%	115,5%
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang	750 orang	693 orang	92,40%

				Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	77	74,87	97,21%
				Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	22 lap	22 lap	100%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan Perangkat Daerah yang disusun	39 dok	41 dok	105,13
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian yang disiapkan	0 dok	0 dok	0%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang disediakan	4 jenis	4 jenis	100%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang disediakan	4 dok	4 dok	100%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Barang dan Jasa yang disediakan	3 lap	3 lap	100%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda yang disediakan	4 jenis	4 jenis	100%
2.	Meningkatkan penanganan konflik sosial	Persentase konflik sosial yang tertangani	Renstra 2024-2026			82%	100%	121,95%
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional	80%	100%	117,64%
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah orang yang mengikuti koordinasii kewaspadaan dini	25 Org	25 Org	100%
3.	Meningkatnya kesadaran politik dan Pendidikan Kewarganegaraan	Persentase pengetahuan masyarakat tentang struktur pemerintahan, proses dan hak politik	Renstra 2024-2026			82%	99,88%	121,8%
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan	80%	100%	125%
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah partai politik yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan	9 parpol	9 parpol	100%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase ormas yang aktif dalam pembangunan	80%	100%	117,64%
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang diberdayakan dalam pembangunan	7 ormas	7 ormas	100%
4.	Tujuan : Meningkatnya tatanan sosial politik yang demokratis dalam kehidupan berbangsa yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029			79,29	82,34	103,85%
5.	Sasaran 1 : Meningkatnya Nilai toleransi keagamaan	Nilai Indeks Toleransi Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029			79,13	82,97	104,85%

				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan kegiatan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama, P4GN dan aliran kepercayaan	100%	100%	100%
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	750 org	693 org	92,40%
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Lap	4 Lap	100%
6.	Sasaran 2 : Menigkatnya Nilai Kesetaraan umat beragama	Nilai Indeks kesetaraan umat beragama Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029			79,42	81,85	103,06%
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	85%	91,37%	107,49%
				Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3.000 org	2.741 org	91,37%
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Lap	4 Lap	100%
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dok	1 Dok	100%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	77	74,87	97,21%
				Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	11 dok	11 dok	100%
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 lap	11 lap	100%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 org	16 org	106,67%
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1 lap	100%
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lapo Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 lap	12 lap	100%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0%

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	100%
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3 paket	100%
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dok	5 dok	100%
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 lap	30 lap	115,38%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	129 unit	129 unit	100%
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	6 unit	100%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	1 lap	1 lap	100%
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 lap	1 lap	50%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	8 unit	100%
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	1 unit	100%
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	15 unit	100%
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%
7.	Sasaran 3 : Meningkatnya Nilai Kerjasama umat beragama	Nilai Indeks kerjasama umat beragama Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029			79,28	82,20	103,68%
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan laporan kewaspadaan dini didaerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	25 org	25 org	100%
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Lap	12 Lap	100%
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 lap	12 Lap	100%
8.	Sasaran 4 : Meningkatnya kapasitas Lembaga demokrasi	Skor capaian kinerja kapasitas lembaga demokrasi Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029			79,93	79,93	100%
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN	Persentase kegiatan pendidikan politik pada	100%	100%	100%

				LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	kader partai politik yang mendapat kursi di DPRD (%)			
					Cakupan pemahaman pendidikan politik di masyarakat	80%	100%	125%
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	400 org	400 Org	100%
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	33 org	33 org	100%
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Lap	4 Lap	100%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase ormas penerima hibah	67%	83%	124,99%
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	71 org	50 org	70,42%
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Lap	4 Lap	100%

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 secara umum menunjukkan

capaian kinerja yang sangat baik. Hal tersebut terlihat dari sebagian besar indikator kinerja yang mampu melampaui target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024–2026 maupun Renstra 2025–2029. Keberhasilan tersebut didukung oleh sinergitas pelaksanaan program, efektivitas koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

1. Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan.

   Keberhasilan capaian kinerja terutama ditunjang oleh beberapa program strategis, antara lain:

   a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
      Program ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesetaraan umat beragama dan penguatan wawasan kebangsaan masyarakat. Capaian indikator persentase masyarakat yang berperan aktif dalam penguatan ideologi Pancasila mencapai 107,49 persen. Keberhasilan tersebut didukung oleh terselenggaranya kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi, serta pembinaan kepaskibrakaan yang berjalan sesuai target. Tingginya partisipasi masyarakat serta keterlibatan generasi muda menjadi faktor utama keberhasilan program ini.

   b. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
      Program ini berperan dalam meningkatkan toleransi keagamaan dan ketahanan sosial masyarakat dengan capaian indikator mencapai 115,5 persen. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi sosial kemasyarakatan dalam menjaga stabilitas sosial dan kerukunan umat beragama.

   c. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
      Program ini memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan penanganan konflik sosial. Indikator kewaspadaan nasional mencapai 117,64 persen, serta seluruh kegiatan koordinasi kewaspadaan dini

dan penanganan konflik sosial terlaksana sesuai target. Keberhasilan ini didukung oleh penguatan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), peningkatan sistem deteksi dini, serta respon cepat terhadap potensi konflik sosial.

d. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Pendidikan Politik. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran politik masyarakat dengan capaian indikator partisipasi partai politik dan pemahaman pendidikan politik masyarakat melebihi target hingga 125 persen. Keberhasilan program ini dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi partai politik, pelaksanaan pendidikan politik secara berkelanjutan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap proses demokrasi.

e. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

   Program ini mendukung penguatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah. Indikator persentase ormas penerima hibah mencapai 124,99 persen. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh meningkatnya peran ormas dalam pembangunan daerah serta optimalnya fasilitasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan.

2. Program/Kegiatan dengan Capaian Belum Optimal

   Meskipun secara umum capaian kinerja tergolong tinggi, terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya belum sepenuhnya mencapai target kuantitas peserta, antara lain:

   a. Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

      Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tercapai sebesar 91,37 persen. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, keterbatasan jangkauan peserta, serta adanya penyesuaian jadwal kegiatan masyarakat.

   b. Kegiatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

      Jumlah peserta pembinaan mencapai 92,40 persen. Belum optimalnya capaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan mobilisasi

peserta serta dinamika kegiatan masyarakat yang bersamaan dengan agenda lain.

c. Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan ormas tercapai sebesar 70,42 persen. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan kesiapan organisasi kemasyarakatan dalam mengikuti pembinaan serta keterbatasan sumber daya organisasi.

3. Dampak Program Terhadap Pencapaian Sasaran Strategis

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 memberikan dampak positif terhadap pencapaian sasaran strategis, antara lain:

a. Tidak terjadinya konflik sosial serta menurunnya potensi konflik sosial di masyarakat.
b. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat dan partisipasi partai politik dalam pembangunan daerah.
c. Meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama yang melampaui target.
d. Stabilnya capaian Indeks Demokrasi Indonesia di Kabupaten Nganjuk.
e. Meningkatnya nilai toleransi, kesetaraan, serta kerjasama antar umat beragama.

4. Kesimpulan Analisis

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat dikategorikan berhasil karena mayoritas indikator kinerja mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun terdapat beberapa kegiatan yang belum tercapai secara optimal, namun secara substantif kegiatan tetap memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk berkomitmen untuk peningkatan efektivitas perencanaan kegiatan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja organisasi.

5. Lampiran Bukti Dukung

Bukti dukung ini disajikan sebagai bentuk akuntabilitas dan validasi terhadap hasil capaian kinerja, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3.11

Link Bukti Dukung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sasaran : Meningkatnya pencegahan konflik sosial	Persentase potensi/gangguan konflik sosial yang teratasi	Renstra 2024-2026	94%	100%	106,38 %	https://drive.google.com/drive/folders/1ZfqfyoR1clGCtFYGdYkniehdtOoTlqlL?usp=sharing
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaaan	Renstra 2024-2026	85%	91,37%	107,49 %	https://drive.google.com/drive/folders/1ncdBG0DAf5iej4l-KEBsl-bDBwdcyE-h?usp=sharing
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mengikuti Penguatan ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	Renstra 2024-2026	3.000 org	2.741 org	91,37%	https://drive.google.com/drive/folders/1ncdBG0DAf5iej4l-KEBsl-bDBwdcyE-h?usp=sharing
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase peningkatan dan pemahaman masyarakat terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Renstra 2024-2026	80%	92,40%	115,5%	https://drive.google.com/drive/folders/15IcaZyWnoIulLLmlQ27qGHiZoCpnKb83?usp=drive_link
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya	Renstra 2024-2026	750 orang	693 orang	92,40%	https://drive.google.com/drive/folders/15IcaZyWnoIulLLmlQ27qGHiZoCpnKb83?usp=drive_link
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Renstra 2024-2026	77	74,87	97,21%	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0VlgmoI6gq3d-wcaks?usp=sharing
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Renstra 2024-2026	22 lap	22 lap	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0VlgmoI6gq3d-wcaks?usp=sharing
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Renstra 2024-2026	39 dok	41 dok	105,13	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0VlgmoI6gq3d-wcaks?usp=sharing
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian yang disiapkan	Renstra 2024-2026	0 dok	0 dok	0%	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0VlgmoI6gq3d-wcaks?usp=sharing
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang disediakan	Renstra 2024-2026	4 jenis	4 jenis	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0VlgmoI6gq3d-wcaks?usp=sharing
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang disediakan	Renstra 2024-2026	4 dok	4 dok	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0VlgmoI6gq3d-wcaks?usp=sharing
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Barang dan Jasa yang disediakan	Renstra 2024-2026	3 lap	3 lap	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0VlgmoI6gq3d-wcaks?usp=sharing

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda yang disediakan	Renstra 2024-2026	4 jenis	4 jenis	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0Vlqmol6qq3d-wcaks?usp=sharing
2.	Meningkatkan penanganan konflik sosial	Persentase konflik sosial yang tertangani	Renstra 2024-2026	82%	100%	121,95 %	https://drive.google.com/drive/folders/1ZfqfyoR1clGCtFYGdYkniehdtOoTlqlL?usp=drive_link
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional	Renstra 2024-2026	80%	100%	117,64 %	https://drive.google.com/drive/folders/1KvJIVxvDZhSQgJ4ZlAmM-0bWjdvFJLd5?usp=drive_link
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah orang yang mengikuti koordinasii kewaspadaan dini	Renstra 2024-2026	25 Org	25 Org	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1KvJIVxvDZhSQgJ4ZlAmM-0bWjdvFJLd5?usp=drive_link
3.	Meningkatnya kesadaran politik dan Pendidikan Kewarganegaraan	Persentase pengetahuan masyarakat tentang struktur pemerintahan, proses dan hak politik	Renstra 2024-2026	82%	99,88%	121,8%	https://drive.google.com/drive/folders/1ZfqfyoR1clGCtFYGdYkniehdtOoTlqlL?usp=sharing
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan	Renstra 2024-2026	80%	100%	117,64 %	https://drive.google.com/drive/folders/1JYQjTKSYzip4yQGHTGR1omaAHH9RarLA?usp=drive_link
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah partai politik yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan	Renstra 2024-2026	9 parpol	9 parpol	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1JYQjTKSYzip4yQGHTGR1omaAHH9RarLA?usp=drive_link
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase ormas yang aktif dalam pembangunan	Renstra 2024-2026	80%	100%	117,64 %	https://drive.google.com/drive/folders/1LeWbqZuMqVAOQseibZrlCXPtnJGxLFOA?usp=drive_link
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang diberdayakan dalam pembangunan	Renstra 2024-2026	7 ormas	7 ormas	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1LeWbqZuMqVAOQseibZrlCXPtnJGxLFOA?usp=drive_link
4.	Tujuan : Meningkatnya tatanan sosial politik yang demokratis dalam kehidupan berbangsa yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	79,29	82,34	103,85 %	https://drive.google.com/file/d/1QwJrcos8T3f0Bd6x0m9-MkEhH12KeYyl/view?usp=sharing
5.	Sasaran : Menigkatnya Nilai Kesetaraan umat beragama	Indikator Nilai Indeks kesetaraan umat beragama Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	79,42	81,85	103,06 %	https://drive.google.com/file/d/1QwJrcos8T3f0Bd6x0m9-MkEhH12KeYyl/view?usp=sharing
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Renstra 2025-2029	85%	91,37%	107,49 %	https://drive.google.com/drive/folders/1ncdBG0DAf5iej4l-KEBsl-bDBwdcyE-h?usp=sharing
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Renstra 2025-2029	3.000 org	2.741 org	91,37%	https://drive.google.com/drive/folders/1ncdBG0DAf5iej4l-KEBsl-bDBwdcyE-h?usp=sharing
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Renstra 2025-2029	4 Lap	4 Lap	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1ncdBG0DAf5iej4l-KEBsl-bDBwdcyE-h?usp=sharing
		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Pumapaskibraka	Renstra 2025-2029	1 Dok	1 Dok	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1ncdBG0DAf5iej4l-KEBsl-bDBwdcyE-h?usp=sharing
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Renstra 2025-2029	77	74,87	97,21%	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0Vlqmol6qq3d-wcaks?usp=sharing
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Renstra 2025-2029	11 dok	11 dok	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0Vlqmol6qq3d-wcaks?usp=sharing

		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Renstra 2025-2029	11 lap	11 lap	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0VlqmoI6qq3d-wcaks?usp=sharing
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Renstra 2025-2029	15 org	16 org	106,67 %	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0VlqmoI6qq3d-wcaks?usp=sharing
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Renstra 2025-2029	1 lap	1 lap	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0VlqmoI6qq3d-wcaks?usp=sharing
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lapo Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Renstra 2025-2029	12 lap	12 lap	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0VlqmoI6qq3d-wcaks?usp=sharing
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Renstra 2025-2029	0	0	0%	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0VlqmoI6qq3d-wcaks?usp=sharing
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Renstra 2025-2029	5 paket	5 paket	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0VlqmoI6qq3d-wcaks?usp=sharing
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Renstra 2025-2029	3 paket	3 paket	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0VlqmoI6qq3d-wcaks?usp=sharing
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Renstra 2025-2029	5 dok	5 dok	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0VlqmoI6qq3d-wcaks?usp=sharing
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Renstra 2025-2029	26 lap	30 lap	115,38 %	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0VlqmoI6qq3d-wcaks?usp=sharing
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Renstra 2025-2029	129 unit	129 unit	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0VlqmoI6qq3d-wcaks?usp=sharing
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Renstra 2025-2029	6 unit	6 unit	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0VlqmoI6qq3d-wcaks?usp=sharing
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Renstra 2025-2029	1 lap	1 lap	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0VlqmoI6qq3d-wcaks?usp=sharing
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Renstra 2025-2029	2 lap	1 lap	50%	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0VlqmoI6qq3d-wcaks?usp=sharing
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Renstra 2025-2029	8 unit	8 unit	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0VlqmoI6qq3d-wcaks?usp=sharing
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Renstra 2025-2029	1 unit	1 unit	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0VlqmoI6qq3d-wcaks?usp=sharing
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Renstra 2025-2029	15 unit	15 unit	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0VlqmoI6qq3d-wcaks?usp=sharing
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Renstra 2025-2029	1 unit	1 unit	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1--Mk2mmMUCVPku0VlqmoI6qq3d-wcaks?usp=sharing
6	Sasaran : Meningkatnya kapasitas Lembaga demokrasi	Skor capaian kinerja kapasitas lembaga demokrasi Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	79,93	79,93	100%	https://drive.google.com/file/d/1Rl4fm9XeoywAFXYJdX84IoepbcvcA5l7/view?usp=sharing
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kegiatan pendidikan politik pada kader partai politik yang mendapat kursi di DPRD (%)	Renstra 2025-2029	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1JYQjTKSYzip4yQGHTGR1omaAHH9RarLA?usp=drive_link
		Cakupan pemahaman pendidikan politik di masyarakat	Renstra 2025-2029	80%	100%	125%	https://drive.google.com/drive/folders/1JYQjTKSYzip4yQGHTGR1omaAHH9RarLA?usp=drive_link
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	Renstra 2025-2029	400 org	400 Org	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1JYQjTKSYzip4yQGHTGR1omaAHH9RarLA?usp=drive_link

	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Renstra 2025-2029	33 org	33 org	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1JYQjTKSYzip4yQGHTGR1omaAHH9RarLA?usp=drive_link
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Renstra 2025-2029	4 Lap	4 Lap	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1JYQjTKSYzip4yQGHTGR1omaAHH9RarLA?usp=drive_link
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase ormas penerima hibah	Renstra 2025-2029	67%	83%	124,99 %	https://drive.google.com/drive/folders/1LeWbqZuMqVAOQseibZrlCXPtnJGxLFOA?usp=drive_link
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Renstra 2025-2029	71 org	50 org	70,42%	https://drive.google.com/drive/folders/1LeWbqZuMqVAOQseibZrlCXPtnJGxLFOA?usp=drive_link
7.		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Renstra 2025-2029	4 Lap	4 Lap	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1LeWbqZuMqVAOQseibZrlCXPtnJGxLFOA?usp=drive_link
	Sasaran : Meningkatnya Nilai toleransi keagamaan	Nilai Indeks Toleransi Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	79,13	82,97	104,85 %	https://drive.google.com/file/d/1QwJrcos8T3f0Bd6x0m9-MkEhH12KeYyl/view?usp=sharing
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan kegiatan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama, P4GN dan aliran kepercayaan	Renstra 2025-2029	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/15IcaZyWnoIulLLmlQ27qGHiZoCpnKb83?usp=drive_link
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Renstra 2025-2029	750 org	693 org	92,40%	https://drive.google.com/drive/folders/15IcaZyWnoIulLLmlQ27qGHiZoCpnKb83?usp=drive_link
8		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Renstra 2025-2029	4 Lap	4 Lap	100%	https://drive.google.com/drive/folders/15IcaZyWnoIulLLmlQ27qGHiZoCpnKb83?usp=drive_link
	Sasaran : Meningkatnya Nilai Kerjasama umat beragama	Nilai Indeks kerjasama umat beragama Kabupaten Nganjuk	Renstra 2025-2029	79,28	82,20	103,68 %	https://drive.google.com/file/d/1QwJrcos8T3f0Bd6x0m9-MkEhH12KeYyl/view?usp=sharing
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan laporan kewaspadaan dini didaerah yang ditindaklanjuti	Renstra 2025-2029	100%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1KvJlVxvDZhSQgJ4ZlAmM-0bWjdvFJLd5?usp=drive_link
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,	Renstra 2025-2029	25 org	25 org	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1KvJlVxvDZhSQgJ4ZlAmM-0bWjdvFJLd5?usp=drive_link

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Secara Umum Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan kebijakan strategis Kabupaten Nganjuk sebagaimana berikut :

2.1. Rencana Strategis (Sumber dari Renstra SKPD)

Renstra Tahun 2024–2026 diarahkan pada upaya penguatan stabilitas sosial dan peningkatan kualitas kehidupan demokrasi masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan pencegahan konflik sosial. Selain itu, dilakukan penguatan penanganan konflik sosial melalui peningkatan persentase konflik sosial yang tertangani.

Di sisi lain, peningkatan kesadaran politik dan pendidikan kewarganegaraan juga menjadi fokus utama, yang ditunjukkan melalui peningkatan persentase pengetahuan masyarakat mengenai struktur pemerintahan, proses politik, dan hak-hak politik. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, dan demokratis

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Renstra ini diselaraskan dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk difokuskan pada penguatan stabilitas politik dan keamanan daerah, peningkatan kerukunan umat beragama, penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat dan partai politik, serta penguatan demokrasi daerah. Sasaran strategis diarahkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun, demokratis, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan kebangsaan.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk menetapkan program dan kegiatan yang mencakup fasilitasi kerukunan umat beragama, pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, pendidikan politik bagi masyarakat dan kader partai politik, serta pemantauan dan evaluasi perkembangan demokrasi dan politik daerah. Pelaksanaan program didukung oleh penguatan kelembagaan, sinergi lintas sektor, serta partisipasi aktif pemangku kepentingan.

Renstra ini juga menekankan pentingnya inovasi dan pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja guna memastikan capaian indikator kinerja utama dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi landasan strategis dalam mendukung terciptanya kondisi daerah yang kondusif, demokratis, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila**.**

2.2. Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian kinerja adalah suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan/instasi yang lebih tinggi kepada pimpinan instasi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan Perjanjian Kinerja terwujudlah suatu komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta Sumber Daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah suatu Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Renstra 2024-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya pencegahan konflik sosial	Persentase potensi gangguan/konflik yang teratasi	%	94
	Meningkatnya penanganan konflik sosial	Persentase konflik sosial yang tertangani	%	82
	Meningkatnya kesadaran politik dan pendidikan kewarganegaraan	Persentase pengetahuan masyarakat tentang struktur pemeintahan, proes dan hak politik	%	82

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Renstra 2025-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya tatanan sosial politik yang demokratis dalam kehidupan berbangsa yag harmonis	Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	79,29
2.	Meningkatnya nilai toleransi keagamaam	Nilai Indeks toleransi Kabupaten Nganjuk	Nilai	79,13
3.	Meningkatnya nilai kesetaraan antar umat beragama	Nilai Indeks kesetaraan umat beragama	Nilai	79,42
4.	Meningkatnya Nilai Kerjasama antar umat beragama	Nilai Indeks kerjasama umat beragama Kabupaten Nganjuk	Nilai	79,28
5.	Meningkatnya kapasitas Lembaga Demokrasi	Skor Capaian kinerja kapasitas lembaga demokrasi Kabupaten Nganjuk	Skor	79,93

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.253.635.113	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.959.940.840	APBD
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	5.358.948.000	APBD
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	927.182.100	APBD
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	502.393.350	APBD
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.118.201.150	APBD

Analisa adanya pergeseran anggaran yang ditampung dalam Perubahan Peraturan APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran pada Program ini sebesar Rp. 5.253.635.113,- berkurang menjadi Rp. 4.788.744.528,-
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
   Anggaran pada Program ini sebesar Rp. 2.959.940.840,- berkurang menjadi Rp. 2.541.221.540,-
3. Program Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
   Anggaran pada Program ini sebesar Rp5.358.948.000,- berkurang menjadi Rp. 3.573.592.000,-
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
   Anggaran pada Program ini sebesar Rp. 927.182.100,- berkurang menjadi Rp. 1.434.254.200,-

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

   Anggaran pada Program ini sebesar Rp.502.393.350,- berkurang menjadi Rp.303.792.550,-

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

   Anggaran pada Program ini sebesar Rp.1.118.201.150,- berkurang menjadi Rp.1.011.137.250,-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
		Konflik di Daerah					
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Renstra 2025-2029	12 lap	12 Lap	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1KvJIVxvDZhSQgJ4ZlAmM-0bWjdvFJLd5?usp=drive_link

3.2. Realisasi Anggaran

Tabel 3.112
Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	Program/Kegiatan/SubKegiatan	TAHUN 2025			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
	Bidang Urusan Kesatuan Bangsa	13.653.102.068	12.893.061.380	760.040.688	94,43%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	4.788.744.528	4.315.598.573	473.145.955	90,12%
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	95.980.300	94.398.500	1.581.800	98,35%
	Penyususnan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.291.300	24.710.500	1.580.800	93,99%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	69.689.000	69.688.000	1.000	100,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.615.823.000	2.329.738.716	286.084.284	89,06%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.542.313.000	2.256.263.716	286.049.284	88,75%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.708.000	9.704.000	4.000	99,96%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	63.802.000	63.771.000	31.000	99,95%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.750.000	2.250.000	500.000	81,82%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.750.000	2.250.000	500.000	81,82%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	373.710.089	352.487.673	21.222.416	94,32%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.345.089	98.580.300	9.764.789	90,99%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.855.000	4.734.500	5.120.500	48,04%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	6.780.000	2.220.000	75,33%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246.510.000	242.392.873	4.117.127	98,33%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	854.559.389	784.825.650	69.733.739	91,84%

NO	Program/Kegiatan/SubKegiatan	TAHUN 2025			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
	Pengadaan Mebel	188.100.000	155.168.350	32.931.650	82,49%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	666.459.389	629.657.300	36.802.089	94,48%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.200.000	59.917.069	9.282.931	86,59%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.690.000	310.000	84,50%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.200.000	58.227.069	8.972.931	86,65%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	776.721.750	691.980.965	84.740.785	89,09%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.634.850	181.248.864	39.385.986	82,15%
	Pemeliharaan Mebel	400.000	400.000	0	100,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	219.734.900	187.281.858	32.453.042	85,23%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	335.952.000	323.050.243	12.901.757	96,16%
2.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.541.221.540	2.353.795.872	187.425.668	92,62%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.541.221.540	2.353.795.872	187.425.668	92,62%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.140.353.500	1.019.706.920	120.646.580	89,42%
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan SejarahKebangsaan	12.345.000	4.125.000	8.220.000	33,41%
	Pembinaan terhadap aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1.388.523.040	1.329.963.952	58.559.088	95,78%
3.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3.573.952.000	3.563.300.250	10.651.750	99,70%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.573.952.000	3.563.300.250	10.651.750	99,70%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	219.893.000	210.765.250	9.127.750	95,85%

NO	Program/Kegiatan/SubKegiatan	TAHUN 2025			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.335.105.000	3.335.105.000	0	100,00%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	18.954.000	17.430.000	1.524.000	91,96%
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.434.254.200	1.416.653.440	17.600.760	98,77%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.434.254.200	1.416.653.440	17.600.760	98,77%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.430.504.200	1.412.978.440	17.525.760	98,77%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.750.000	3.675.000	75.000	98,00%
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	303.792.550	286.936.245	16.856.305	94,45%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	303.792.550	286.936.245	16.856.305	94,45%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	303.042.550	286.786.245	16.256.305	94,64%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	750.000	150.000	600.000	20,00%
6.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.011.137.250	956.777.000	54.360.250	94,62%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.011.137.250	956.777.000	54.360.250	94,62%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	274.768.750	254.440.000	20.328.750	92,60%

NO	Program/Kegiatan/SubKegiatan	TAHUN 2025			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	18.156.000	16.417.000	1.739.000	90,42%
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	718.212.500	685.920.000	32.292.500	95,50%

Sumber data : LRA Bakesbangpol 2025

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pagu Anggaran Tahun 2025 setelah Perubahan APBD adalah sebsesar Rp. 13.653.102.068,- Realisasi keuangan sampai dengan Tribulan IV (Januari s/d Desember) Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 12.893.061.380,- atau 94,43% dari total Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
   Pagu dari Program ini sebesar Rp. 4.788.744.528,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.316.860.955,-, atau (25,58%), terdiri dari 7 kegiatan dan 18 sub kegiatan.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
   Pagu dari Program ini sebesar Rp. 2.541.221.540,- dan terealisasi sebesar Rp. 844.493.670,- atau (33,23%), terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
   Pagu dari Program ini sebesar Rp. 3.573.952.000,- dan terealisasi sebesar Rp.22.394.000,- atau (0,63%), terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan.
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
   Pagu dari Program ini sebesar Rp. 1.434.254.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 627.672.340,- atau (43,76%), terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Pagu dari Program ini sebesar Rp. 303.792.550,- dan terealisasi sebesar Rp. 192.486.245,- atau (63,36%), terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

   Pagu dari Program ini sebesar Rp. 1.011.137.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 488.647.000,- atau (48,33%), terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 ini diharapkan menjadi sarana untuk menginformasikan tentang pencapaian target kinerja dan proses pencapaiannya yang berkaitan dengan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025.

A. Permasalahan

Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 pada umumnya telah menunjukkan capaian kinerja yang baik. Namun demikian, dalam proses pencapaian sasaran kinerja masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Pertama, **dinamika sosial dan potensi konflik yang bersifat fluktuatif** masih menjadi tantangan utama dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial. Perkembangan isu sosial, keagamaan, dan politik yang terjadi secara cepat, termasuk penyebaran informasi yang tidak akurat melalui media sosial, berpotensi memicu gangguan ketertiban dan konflik di masyarakat yang sulit diprediksi secara dini.

Kedua, **tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan politik** belum merata. Meskipun kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik telah dilaksanakan, cakupan dan kedalaman pemahaman masyarakat, khususnya pada kelompok tertentu seperti pemilih pemula dan masyarakat di wilayah terpencil, masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan.

Ketiga, **kapasitas kelembagaan dan sumber daya pendukung** dalam pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk masih terbatas. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun

kompetensi teknis tertentu, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung berdampak pada optimalisasi pelaksanaan program, terutama yang memerlukan pemantauan intensif dan respon cepat terhadap potensi konflik sosial.

Keempat, **koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor** meskipun telah berjalan dengan baik, masih memerlukan penguatan dalam aspek konsistensi dan keberlanjutan. Perbedaan persepsi, prioritas program, serta mekanisme kerja antar pemangku kepentingan terkadang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan secara terpadu.

Kelima, **tantangan dalam pengukuran dan pemutakhiran data kinerja** juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Pengumpulan data indikator kinerja, khususnya yang bersifat indeks dan berbasis persepsi masyarakat, masih memerlukan waktu, metodologi yang konsisten, serta dukungan data yang valid agar hasil pengukuran kinerja dapat mencerminkan kondisi aktual secara akurat.

B. Strategi Pemecahan Masalah

Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang mempengaruhi capaian kinerja Tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk menerapkan sejumlah strategi pemecahan masalah yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Strategi ini difokuskan pada penguatan pencegahan konflik, peningkatan kualitas sumber daya dan kelembagaan, serta optimalisasi sinergi dengan pemangku kepentingan.

Pertama, **penguatan sistem pencegahan dan deteksi dini konflik sosial** dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan konflik, peningkatan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta penguatan koordinasi dengan Forkopimda dan aparat keamanan. Pendekatan preventif dan persuasif terus diutamakan melalui dialog, mediasi, dan komunikasi sosial guna meminimalkan eskalasi potensi konflik di masyarakat.

Kedua, **peningkatan pemahaman ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan politik masyarakat** dilaksanakan melalui perluasan cakupan sosialisasi dengan metode yang lebih adaptif dan partisipatif. Pemanfaatan media digital, kolaborasi dengan satuan pendidikan, organisasi

kemasyarakatan, serta komunitas pemuda menjadi strategi utama untuk menjangkau kelompok sasaran yang lebih luas dan beragam.

Ketiga, **penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur** dilakukan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penataan pembagian tugas yang lebih efektif, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan, khususnya dalam penanganan konflik sosial dan fasilitasi kehidupan demokrasi.

Keempat, **penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor** terus ditingkatkan melalui forum koordinasi rutin, penyusunan mekanisme kerja yang lebih jelas, serta peningkatan peran mitra strategis seperti FKUB, FKDM, partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan media massa. Sinergi ini menjadi kunci dalam menciptakan respon yang cepat, tepat, dan terintegrasi terhadap dinamika sosial politik daerah.

Kelima, **peningkatan kualitas pengelolaan data dan evaluasi kinerja** dilakukan dengan memperbaiki mekanisme pengumpulan data, pemutakhiran indikator kinerja, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Dengan data yang akurat dan terukur, perencanaan dan pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Melalui penerapan strategi pemecahan masalah tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus memperkuat perannya dalam menciptakan kondisi daerah yang aman, kondusif, demokratis, dan harmonis secara berkelanjutan.

.

C. Upaya-upaya organisasi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan pada masa mendatang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan melakukan berbagai upaya strategis yang terencana dan terukur, dengan mengedepankan penguatan pencegahan konflik, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan tata kelola kelembagaan.

Pertama, **penguatan pendekatan preventif dalam pencegahan konflik sosial** akan terus ditingkatkan melalui optimalisasi sistem deteksi dini, pemetaan wilayah rawan konflik, serta peningkatan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Upaya ini diarahkan untuk meminimalkan potensi gangguan dan konflik sosial sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

Kedua, **peningkatan kualitas dan jangkauan pendidikan politik serta penguatan ideologi Pancasila** akan dilakukan melalui pengembangan metode sosialisasi yang lebih inovatif, partisipatif, dan berbasis teknologi informasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk akan memperluas kerja sama dengan satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas pemuda guna meningkatkan kesadaran politik dan wawasan kebangsaan masyarakat secara lebih merata.

Ketiga, **penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur** menjadi prioritas melalui peningkatan kompetensi aparatur, penataan organisasi yang lebih efektif, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung. Penguatan ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Keempat, **penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor** akan terus ditingkatkan dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Forkopimda, partai politik, organisasi kemasyarakatan, media, dan masyarakat sipil. Sinergi yang kuat menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas politik dan sosial yang kondusif serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelima, **peningkatan kualitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja** akan dilakukan melalui penyempurnaan indikator kinerja, pemanfaatan data yang lebih akurat dan mutakhir, serta evaluasi berkala terhadap capaian program dan kegiatan. Dengan demikian, perencanaan dan pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil.

Melalui upaya-upaya tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi secara

berkelanjutan serta berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan kondisi daerah yang aman, nyaman, demokratis, dan harmonis.

Nganjuk, 30 Januari 2026

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK

Drs. EKO SUTRISNO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680311 198903 1 009

LAMPIRAN
1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM ASHARI, S.Sos

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nganjuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : SRI HANDOKO TARUNA, S.STP, M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Nganjuk

Selaku atasan Pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
SRI HANDOKO TARUNA, S.STP,M.Si	**IMAM ASHARI, S.Sos**
	Pembina Utama Muda
	NIP. 19670614 198902 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NGANJUK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pencegahan konflik sosial	Persentase potensi/gangguan konflik sosial yang teratasi	94%
2.	Meningkatkan penanganan konflik sosial	Persentase konflik sosial yang tertangani	82%
3.	Meningkatnya kesadaran politik dan pendidikan kewrganegaraan	Persentase pengetahuan masyarakat tentang struktur pemerintahan, proses dan hak politik	82%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.253.635.113	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 2.959.940.840	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 5.358.948.000	APBD
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Rp. 927.182.100	APBD
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Rp. 502.393.350	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.118.201.150	APBD

Nganjuk, 02 Januari 2025

Pj. Bupati Nganjuk

SRI HANDOKO TARUNA, S.STP, M.Si

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Nganjuk

IMAM ASHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670614 198902 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan

manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. EKO SUTRISNO, MM

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Nganjuk

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A

Jabatan : Bupati Nganjuk

Selaku atasan Pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 30 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A.	**Drs. EKO SUTRISNO, MM**
	Pembina Utama Muda
	NIP. 19680311 198903 1 009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NGANJUK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya tatanan sosial politik yang demokratis dalam kehidupan berbangsa yang harmonis	Indeks kerukunan umat beragama Kabupaten Nganjuk	79,29
2	Meningkatnya Nilai toleransi keagamaan	Nilai indeks toleransi Kabupaten Nganjuk	79,13
3	Meningkatnya Nilai kesetaraan antar umat beragama	Nilai indeks kesetaraan umat beragama Kabupaten Nganjuk	79,42
4	Meningkatnya Nilai kerjasama antar umat beragama	Nilai indeks kerjasama umat beragama Kabupaten Nganjuk	79,28
5	Meningkatnya Kapasitas Lembaga demokrasi	Skor capaian kinerja kapasitas lembaga demokrasi Kabupaten Nganjuk	79,93

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.773.027.663	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 2.352.117.540	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 5.166.504.500	APBD
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Rp. 884.254.200	APBD
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Rp. 303.792.550	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.011.137.250	APBD

Nganjuk, 30 September 2025

PIHAK KEDUA

Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A.

PIHAK PERTAMA

Drs. EKO SUTRISNO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680311 198903 1 009

LAMPIRAN 2

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Supriyadi No. 5 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp (0358) 3516135 e-mail : bakesbangpol@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 34 /K/411.405/2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undanh Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten NganjukTahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Nganjuk tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
pada tanggal : 28 Desember 2023

an. BUPATI NGANJUK
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK

IMAM ASHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670614 198902 1 002

Lampiran : Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 188/ 34 /K/411.405/2023
Tanggal : 28 Desember 2023

1. Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Nganjuk
2. Nama Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Tugas : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Fungsi :
   a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;

f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

Sasaran		Formulasi	Target			Penanggung Jawab	Sumber Data
Uraian	Indikator Kinerja		2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan pencegahan, penanganan dan pemulihan pasca konflik	Persentase potensi gangguan/konflik yang teratasi	Jumlah potensi/gangguan konflik yg tertangani / Jumlah potensi/gangguan konflik yang terjadi X 100%	93%	94%	95%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nganjuk	Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

Ditetapkan di : Nganjuk
pada tanggal : 28 Desember 2023
an. BUPATI NGANJUK
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK

IMAM ASHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670614 198902 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Supriyadi No. 5 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp (0358) 3516135 e-mail : bakesbangpol@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 100.3.3.2/ 71 /411.405/2024

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undanh Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten NganjukTahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Nganjuk tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026.

KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
pada tanggal : 30 Desember 2024

an. BUPATI NGANJUK
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK

IMAM ASHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670614 198902 1 002

Lampiran : Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 100.3.3.2/ 91 /411.405/2024
Tanggal : 30 Desember 2024

1. Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Nganjuk
2. Nama Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Tugas : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Fungsi :
   a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;

f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

Sasaran		Formulasi	Target			Penanggung Jawab	Sumber Data
Uraian	Indikator Kinerja		2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya pencegahan konflik sosial	Persentase potensi/gangguan konflik sosial yang teratasi	Jumlah potensi/gangguan konflik sosial yang teratasi / Jumlah potensi/gangguan konflik sosial yang X 100%	93%	94%	95%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nganjuk	Pohon Kinerja Bakesbangpol
Meningkatkan penanganan konflik sosial	Persentase konflik sosial yang tertangani	Jumlah konflik sosial yang tertangani / Jumlah konflik sosial yang terjadi X 100%	82%	82%	84%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nganjuk	Pohon Kinerja Bakesbangpol
Meningkatnya kesadaran politik dan pendidikan kewrganegaraan	Persentase pengetahuan masyarakat tentang struktur pemerintahan, proses dan hak politik	Jumlah kader partai politik yang mengikuti pendidikan politik / Jumlah Kader Partai Politik X 100%	80%	82%	83%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nganjuk	Pohon Kinerja Bakesbangpol

Ditetapkan di : Nganjuk
pada tanggal : Desember 2024
an. BUPATI NGANJUK
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK

IMAM ASHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670614 198902 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Supriyadi No. 5 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp (0358) 3516135 e-mail : bakesbangpol@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 100.3.3.2/ 69 /411.405/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undanh Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Perataran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
13. Peraturan Daerah Kabupaten 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Nganjuk tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis

(Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
pada tanggal : 22 September 2025

an. BUPATI NGANJUK
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK

Drs. EKO SUTRISNO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680311 198903 1 009

Lampiran : Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 100.3.3.2/ 69 /411.405/2025
Tanggal : 22 September 2025

1. Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Nganjuk
2. Nama Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Tugas : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Fungsi :
   a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan

konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;

f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

Sasaran		Formulasi/Penjelasan	Target						Penanggung Jawab	Sumber Data
Uraian	Indikator Kinerja		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya tatanan sosial politik yang demokratis dalam kehidupan berbangsa yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk	Indeks KUB= $\frac{\sum \text{Skor Dimensi}}{3}$ Penjelasan : Dimensi IKUB terdiri dari Dimensi Toleransi, Kesetaraan dan kerjasama. Pengumpulan data IKUB bersifat survei lapangan menggunakan kuesioner terstruktur. Populasi minimal mengikuti standar BPS atau Kemendagri (stratified random sampling, mempertimbangkan porsi agama mayoritas/minoritas, jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan)	79,29	79,34	79,39	79,44	79,50	79,55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nganjuk	Pohon Kinerja Bakesbangpol, Renstra 2025-2029
Meningkatnya Nilai toleransi keagamaan	Nilai indeks toleransi Kabupaten Nganjuk	Skor Dimensi= $\frac{\sum \text{skor jawaban}}{\text{Jumlah pertanyaan}}$ Penjelasan : Indeks Toleransi mengukur penerimaan atas keragaman keyakinan, sikap anti kekerasan, pengakuan hak minoritas, dan tingkat intoleransi di masyarakat	79,13	79,15	79,17	79,19	79,21	79,23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nganjuk	Pohon Kinerja Bakesbangpol, Renstra 2025-2029
Meningkatnya Nilai kesetaraan antar umat beragama	Nilai indeks kesetaraan Umat beragama Kabupaten Nganjuk	Skor Dimensi= $\frac{\sum \text{skor jawaban}}{\text{Jumlah pertanyaan}}$ Penjelasan : Indeks Kesetaraan Umat Beragama	79,42	79,44	79,48	79,48	79,50	79,52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nganjuk	Pohon Kinerja Bakesbangpol, Renstra 2025-2029

Sasaran		Formulasi/Penjelasan	Target						Penanggung Jawab	Sumber Data
Uraian	Indikator Kinerja		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		menilai sejauh mana warga dari berbagai agama memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, serta akses terhadap pelayanan dan partisipasi publik								
Meningkatnya Nilai kerjasama antar umat beragama	Nilai indeks kerjasama umat beragama Kabupaten Nganjuk	Skor Dimensi= $\frac{\sum \text{skor jawaban}}{\text{Jumlah pertanyaan}}$ Penjelasan : Indeks Kerjasama Umat Beragama menilai besarnya prakarsa, partisipasi, dan keberhasilan kolaborasi lintas agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	79,28	79,30	79,32	79,34	79,36	79,38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nganjuk	Pohon Kinerja Bakesbangpol, Renstra 2025-2029
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Demokrasi	Skor Capaian Kinerja Kapasitas Lembaga Demokrasi Kabupaten Nganjuk	Skor Aspek= $\frac{\sum \text{skor variabel}}{\text{Jumlah variabel}}$ Penjelasan : kapasitas demokrasi diukur dari 8 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial : - Kinerja Lembaga Legislatif - Kinerja Lembaga Yudikatif - Netralitas Penyelenggaraan Pemilu - Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Terkait Kebijakan Pejabat Pemerintah - Jaminan Pemerintah/Pemerintah Daerah Terhadap Pelestarian Lingkungan Dan Ruang Hidup Masyarakat - Transparansi Anggaran Dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D Oleh Pemerintah - Kinerja Birokrasi Dalam Pelayanan	79,93	80,18	80,43	80,68	80,93	81,18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nganjuk	Pohon Kinerja Bakesbangpol, Renstra 2025-2029

Sasaran		Formulasi/Penjelasan	Target						Penanggung Jawab	Sumber Data
Uraian	Indikator Kinerja		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Publik - Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik								

Ditetapkan di : Nganjuk
pada tanggal : 22 September 2025
an. BUPATI NGANJUK
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK

Drs. EKO SUTRISNO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680311 198903 1 009

LAMPIRAN
3

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.02.0000/001/2025

SKPD : 8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									Rp15.299.535.129,00	Rp820.755.424,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.120.290.553,00	
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				Rp15.299.535.129,00	Rp820.755.424,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.120.290.553,00	
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				Rp15.299.535.129,00	Rp820.755.424,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.120.290.553,00	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp4.432.869.689,00	Rp820.755.424,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.253.625.113,00	
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp145.748.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp145.748.500,00	
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Nganjuk, Nganjuk, Semua Kelurahan/Desa		Rp53.670.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.670.000,00	
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Nganjuk, Nganjuk, Semua Kelurahan/Desa		Rp92.078.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.078.500,00	
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp2.499.872.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.499.872.000,00	
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Nganjuk, Nganjuk, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.407.217.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.407.217.000,00	
8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Nganjuk, Nganjuk, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.840.000,00	
8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kab. Nganjuk, Nganjuk, Semua Kelurahan/Desa		Rp79.815.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.815.000,00	
8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp107.522.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.522.250,00	
8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran		Rp9.734.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.734.250,00	
8	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp97.788.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.788.000,00	
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp698.064.389,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp698.064.389,00	
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran		Rp137.244.889,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp137.244.889,00	
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran		Rp21.512.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.512.500,00	
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran		Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp530.307.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp530.307.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp63.259.500,00	Rp820.755.424,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp884.014.924,00	
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran		Rp63.259.500,00	Rp144.043.035,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp207.302.535,00	
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran		Rp0,00	Rp676.712.389,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp676.712.389,00	
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp69.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.450.000,00	
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran		Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran		Rp67.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.200.000,00	
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp848.953.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp848.953.050,00	
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran		Rp269.981.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp269.981.250,00	
8	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel		Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran		Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran		Rp239.019.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp239.019.800,00	
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran		Rp335.952.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp335.952.000,00	
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**				Rp2.959.940.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.959.940.840,00	
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**				Rp2.959.940.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.959.940.840,00	
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.495.873.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.495.873.800,00	
8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.850.000,00	
8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.443.217.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.443.217.040,00	
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**				Rp5.358.948.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.358.948.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**				Rp5.358.948.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.358.948.000,00	
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp397.407.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp397.407.500,00	
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.927.657.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.927.657.500,00	
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp33.883.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.883.000,00	
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**				Rp927.182.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp927.182.100,00	
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**				Rp927.182.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp927.182.100,00	
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp919.682.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp919.682.100,00	
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,		Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.500.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
					Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**				Rp502.393.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp502.393.350,00	
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**				Rp502.393.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp502.393.350,00	
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp500.893.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.893.350,00	
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**				Rp1.118.201.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.118.201.150,00	
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**				Rp1.118.201.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.118.201.150,00	
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp351.819.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp351.819.150,00	
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp31.125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.125.000,00	
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp735.257.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp735.257.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp634.894.766,00
Februari	Rp1.813.901.594,00
Maret	Rp847.583.505,00
April	Rp1.823.468.256,00
Mei	Rp5.439.637.280,00
Juni	Rp1.314.560.886,00
Juli	Rp1.218.741.089,00
Agustus	Rp1.192.839.960,00
September	Rp634.438.701,00
Oktober	Rp528.156.882,00
November	Rp347.749.584,00
Desember	Rp324.318.050,00
Jumlah	**Rp16.120.290.553,00**

Nganjuk, Tanggal 02 Januari 2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

IMAM ASHARI, S.Sos
NIP. 196706141989021002

Mengesahkan,
PPKD

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
NIP. 196805111992022001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Drs. ADAM MUHARTO, A.P., M.Si	197305111993111002	Wakil Ketua	
3.	Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si	196805111992022001	Sekretaris	

*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/8.01.0.00.0.00.02.0000/001/2025

SKPD : 8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
8.01.0.00.0.00.02.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									Rp15.299.535.129,00	Rp820.755.424,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.120.290.553,00	Rp12.862.960.479,00	Rp790.141.589,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.653.102.068,00	(Rp2.467.188.485,00)	(18.07)	
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				Rp15.299.535.129,00	Rp820.755.424,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.120.290.553,00	Rp12.862.960.479,00	Rp790.141.589,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.653.102.068,00	(Rp2.467.188.485,00)	(18.07)	
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				Rp15.299.535.129,00	Rp820.755.424,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.120.290.553,00	Rp12.862.960.479,00	Rp790.141.589,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.653.102.068,00	(Rp2.467.188.485,00)	(18.07)	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp4.432.869.689,00	Rp820.755.424,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.253.625.113,00	Rp3.998.602.939,00	Rp790.141.589,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.788.744.528,00	(Rp464.880.585,00)	(9.71)	
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp145.748.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp145.748.500,00	Rp95.980.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.980.300,00	(Rp49.768.200,00)	(51.85)	
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Semua Kelurahan/Desa		Rp53.670.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.670.000,00	Rp26.291.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.291.300,00	(Rp27.378.700,00)	(104.14)	
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Semua Kelurahan/Desa		Rp92.078.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.078.500,00	Rp69.689.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.689.000,00	(Rp22.389.500,00)	(32.13)	
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp2.499.872.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.499.872.000,00	Rp2.615.823.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.615.823.000,00	Rp115.951.000,00	4.43	
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.407.217.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.407.217.000,00	Rp2.542.313.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.542.313.000,00	Rp135.096.000,00	5.31	
8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.840.000,00	Rp9.708.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.708.000,00	(Rp3.132.000,00)	(32.26)	
8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Semua Kelurahan/Desa		Rp79.815.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.815.000,00	Rp63.802.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.802.000,00	(Rp16.013.000,00)	(25.10)	
8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp107.522.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.522.250,00	Rp2.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.750.000,00	(Rp104.772.250,00)	(3809.90)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran		Rp9.734.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.734.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp9.734.250,00)	(Infinity)	
8	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp97.788.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.788.000,00	Rp2.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.750.000,00	(Rp95.038.000,00)	(3455.93)	
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp698.064.389,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp698.064.389,00	Rp373.710.089,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp373.710.089,00	(Rp324.354.300,00)	(86.79)	
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran		Rp137.244.889,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp137.244.889,00	Rp108.345.089,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.345.089,00	(Rp28.899.800,00)	(26.67)	
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran		Rp21.512.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.512.500,00	Rp9.855.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.855.000,00	(Rp11.657.500,00)	(118.29)	
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran		Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	0.00	
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp530.307.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp530.307.000,00	Rp246.510.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.510.000,00	(Rp283.797.000,00)	(115.13)	
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp63.259.500,00	Rp820.755.424,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp884.014.924,00	Rp64.417.800,00	Rp790.141.589,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp854.559.389,00	(Rp29.455.535,00)	(3.45)	
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran		Rp63.259.500,00	Rp144.043.035,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp207.302.535,00	Rp61.450.000,00	Rp126.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp188.100.000,00	(Rp19.202.535,00)	(10.21)	
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran		Rp0,00	Rp676.712.389,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp676.712.389,00	Rp2.967.800,00	Rp663.491.589,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp666.459.389,00	(Rp10.253.000,00)	(1.54)	
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp69.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.450.000,00	Rp69.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.200.000,00	(Rp250.000,00)	(0.36)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran		Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	(Rp250.000,00)	(12.50)	
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran		Rp67.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.200.000,00	Rp67.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.200.000,00	Rp0,00	0.00	
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp848.953.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp848.953.050,00	Rp776.721.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp776.721.750,00	(Rp72.231.300,00)	(9.30)	
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran		Rp269.981.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp269.981.250,00	Rp220.634.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp220.634.850,00	(Rp49.346.400,00)	(22.37)	
8	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran		Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000,00	(Rp3.600.000,00)	(900.00)	
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran		Rp239.019.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp239.019.800,00	Rp219.734.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp219.734.900,00	(Rp19.284.900,00)	(8.78)	
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran		Rp335.952.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp335.952.000,00	Rp335.952.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp335.952.000,00	Rp0,00	0.00	
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**				Rp2.959.940.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.959.940.840,00	Rp2.541.221.540,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.541.221.540,00	(Rp418.719.300,00)	(16.48)	
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**				Rp2.959.940.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.959.940.840,00	Rp2.541.221.540,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.541.221.540,00	(Rp418.719.300,00)	(16.48)	
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.495.873.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.495.873.800,00	Rp1.140.353.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.140.353.500,00	(Rp355.520.300,00)	(31.18)	
8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.850.000,00	Rp12.345.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.345.000,00	(Rp8.505.000,00)	(68.89)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.443.217.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.443.217.040,00	Rp1.388.523.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.388.523.040,00	(Rp54.694.000,00)	(3.94)	
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**				Rp5.358.948.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.358.948.000,00	Rp3.573.952.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.573.952.000,00	(Rp1.784.996.000,00)	(49.94)	
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**				Rp5.358.948.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.358.948.000,00	Rp3.573.952.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.573.952.000,00	(Rp1.784.996.000,00)	(49.94)	
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp397.407.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp397.407.500,00	Rp219.893.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp219.893.000,00	(Rp177.514.500,00)	(80.73)	
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.927.657.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.927.657.500,00	Rp3.335.105.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.335.105.000,00	(Rp1.592.552.500,00)	(47.75)	
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp33.883.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.883.000,00	Rp18.954.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.954.000,00	(Rp14.929.000,00)	(78.76)	
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**				Rp927.182.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp927.182.100,00	Rp1.434.254.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.434.254.200,00	Rp507.072.100,00	35.35	
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**				Rp927.182.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp927.182.100,00	Rp1.434.254.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.434.254.200,00	Rp507.072.100,00	35.35	
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp919.682.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp919.682.100,00	Rp1.430.504.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.430.504.200,00	Rp510.822.100,00	35.71	
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	Dana Alokasi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan,		Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.500.000,00	Rp3.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.750.000,00	(Rp3.750.000,00)	(100.00)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Umum (DAU)	Semua Kelurahan/Desa														
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**				Rp502.393.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp502.393.350,00	Rp303.792.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp303.792.550,00	(Rp198.600.800,00)	(65.37)	
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**				Rp502.393.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp502.393.350,00	Rp303.792.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp303.792.550,00	(Rp198.600.800,00)	(65.37)	
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp500.893.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.893.350,00	Rp303.042.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp303.042.550,00	(Rp197.850.800,00)	(65.29)	
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp750.000,00	(Rp750.000,00)	(100.00)	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**				Rp1.118.201.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.118.201.150,00	Rp1.011.137.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.011.137.250,00	(Rp107.063.900,00)	(10.59)	
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**				Rp1.118.201.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.118.201.150,00	Rp1.011.137.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.011.137.250,00	(Rp107.063.900,00)	(10.59)	
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp351.819.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp351.819.150,00	Rp274.768.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp274.768.750,00	(Rp77.050.400,00)	(28.04)	
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp31.125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.125.000,00	Rp18.156.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.156.000,00	(Rp12.969.000,00)	(71.43)	
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp735.257.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp735.257.000,00	Rp718.212.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp718.212.500,00	(Rp17.044.500,00)	(2.37)	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp581.993.166,00
Februari	Rp1.666.686.134,00
Maret	Rp856.096.005,00
April	Rp4.869.934.077,00
Mei	Rp476.716.651,00
Juni	Rp941.331.957,00
Juli	Rp879.489.035,00
Agustus	Rp1.037.607.481,00
September	Rp340.171.072,00
Oktober	Rp1.465.129.742,00
November	Rp312.217.584,00
Desember	Rp225.729.164,00
Jumlah	**Rp13.653.102.068,00**

Nganjuk, Tanggal 20 Oktober 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs. EKO SUTRISNO, MM

NIP. 196803111989031009

Mengesahkan,

PPKD

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si

NIP. 196805111992022001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Drs. ADAM MUHARTO, A.P., M.Si	197305111993111002	Wakil Ketua	
3.	Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si	196805111992022001	Sekretaris	

*) Sesuai periodisasi SPD